



# KALO

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Volume 7 Tahun 2021



- Pendampingan LPMP Prov. Sultra terhadap Pelaksanaan ANBK
- LPMP Prov. Sultra bersama BP-PAUD & Dikmas Sultra Gelar Sosialisasi PSP Angkatan Kedua
- Seleksi Kompetensi Tahap I PPPK Guru melibatkan LPMP Prov. Sultra sebagai Pengawas Utama
- LPMP Prov. Sultra bersama BP-PAUD & Dikmas laksanakan Choaching Klinik



9 772154 512000

ISSN 2654 - 5128

JL. D.I PANJAITAN NO.83 LEPO-LEPO  
KEL. WUNDUDOPI, KEC. BARUGA, KOTA KENDARI  
SULAWESI TENGGARA

KEMENTERAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
2021



## Dewan Redaksi

### Penanggung Jawab

Junaidin Pagala, S.T, M.T

### Redaktur

Soesiana Arani, S.Pd, M.Si

### Penyunting

Wahyu Falah, S.Si, M.Si

Isnawati Abbas, M.Pd, M.A

Misrawati Syahrir, S.Sos, M.A

### Desain Grafis

Ince Amriani S. Azir, S.Si

### Tim Sekretariat

Kartini, S.Si, M.Si

Sitti Samsuria, S.E

Rika Ernita Mekuo, S.Si, M.Si

Tunas Riyanto, S.Ip

Haeruddin, A.Md

Hasliati, A.Md

ISSN: 2654-5128



9 772654 512000

## Pengantar Redaksi

Bismillahirrahmannrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sahabat KALO yang budiman, alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wataala atas limpahan rahmat dan hdayahNya sehingga Majalah KALO LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 ini dapat terbit dan hadir dihadapan para pembaca.

Edisi kali ini kembali hadir dengan tema pendidikan terutama pada peningkatan mutu pendidikan, dengan penulis terdiri dari widyaprada, guru, Pengembang Teknologi Pendidikan (PTP), pemerhati pendidikan dan staf LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain menambah wawasan, melalui majalah ini diharapkan para pembaca akan semakin memahami bahwa peningkatan mutu pendidikan khususnya di Provnsi Sulawesi Tenggara merupakan tanggung jawab seluruh aspek mulai dari guru, pengawas, instansi terkait, dan pemerintah serta keluarga dan masyarakat.

Kami berharap artikel-artikel ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan para pembaca. Kami juga mengajak untuk berkontribusi dalam berbagi ilmu dan pengetahuan dibidang keahlian masing-masing sehingga memperkaya khasanah Majalah KALO kedepan.

Tak lupa kami mengharapkan permohonan maaf, karena kami menyadari bahwa majalah ni masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk terus melakukan upaya perbaikan untuk menjadikan majalah ini semakin berkualitas.

LPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. D.I Panjaitan No. 83 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari  
Sulawesi Tenggara 93116

Laman : [lpmpsultra.kemdikbud.go.id](http://lpmpsultra.kemdikbud.go.id)

Facebook fanpage : LPMP Sulawesi Tenggara

Instagram : [lpmp\\_sulawesitenggara](https://www.instagram.com/lpmp_sulawesitenggara)

Youtube : LPMP Sulawesi Tenggara

# Daftar Isi

## Rubrik Utama

- Pendampingan LPMP Prov. Sultra terhadap Pelaksanaan ANBK 3
- LPMP Prov. Sultra bersama BP-PAUD & Dikmas Sultra Gelar Sosialisasi PSP Angkatan Kedua 5
- Seleksi Kompetensi Tahap I PPPK Guru Libatkan LPMP Prov. Sultra sebagai Pengawas Utama 7
- LPMP Prov. Sultra bersama BP-PAUD & Dikmas Sultra Laksanakan Choaching Klinik 9

## Rubrik Edukasi

- Program Organisasi Penggerak: Paradigma Perubahan Pendidikan Menuju Indonesia Maju 10
- Efektivitas Media Pembelajaran My Cho Pic dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Descriptive Text pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris 15
- Cornell Note Taking dalam Pembelajaran Sainifik 18
- Pengetahuan, Keterampilan, dan Kompetensi: Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Perspektif Penjaminan Mutu 22
- Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah 26
- Flipped Classroom Luring-Daring memanfaatkan Program Belajar dari Rumah di TVRI dan Akun Pembelajaran 28
- Desain Alternatif Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah Bergerak Terpadu (Deal PMP Pemda Beradu) Sebuah Aksi Terobosan Pemajuan Pendidikan 32
- Asesmen Nasional: Terobosan Baru dalam Penilaian Mutu Sekolah, Madrasah dan Program Kesetaraan 35
- Proses Pendidikan Guru Penggerak, Mengapa Sembilan Bulan? 39
- Supervisi Akademik Berbasis Konsul, Kon, dan Koteka sebuah Langkah Penjaminan Mutu dengan Model Artistik yang Menginspirasi dan Memikat 42

## Rubrik Opini

- Mencegah Kasus Eksploitasi Seksual Anak Meningkat dengan Pendidikan Islam secara Dini 45

## Rubrik Serba-Serbi

- Dokumentasi Kegiatan 48
- Serba-Serbi Pantun 50
- Giat Anak PAUD TPA Teratai LPMP Prov. Sultra 51



# PENDAMPINGAN LPMP PROV. SULTRA TERHADAP PELAKSANAAN ANBK



Sri Rianti A.M Rays, S.Pd, M.Si

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi - LPMP Prov. Sultra

Program Asesmen Nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid.

Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau (a) perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan (b) kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan (misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antardaerah, ataupun kesenjangan antarkelompok berdasarkan atribut tertentu). Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu

Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. (POSAN, 2021)

pembelajaran.

Salah satu komponen hasil belajar siswa yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca serta literasi matematika (numerasi). Asesmen ini disebut sebagai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Berbeda dengan asesmen berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran.

Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Asesmen Kompetensi Minimum akan dilaksanakan pada peserta didik yang duduk di pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 4 untuk jenjang SD, kelas 8 untuk jenjang SMP, dan kelas 11 untuk jenjang SMA.



Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa.

Survei Karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Sedangkan Survei Lingkungan Belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat ANBK adalah asesmen yang menggunakan komputer secara daring dan semidaring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. Dan Pelaksana Asesmen Nasional adalah lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan kebijakan teknis Asesmen Nasional pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan sekolah Indonesia di luar negeri.

Menurut POS AN tahun 2021 salah satu Pelaksana Asesmen Nasional tingkat provinsi yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan AN di wilayahnya, melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan AN dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, melakukan pendampingan pelaksanaan AN di wilayahnya, melakukan verifikasi kesiapan infrastruktur pelaksanaan AN di wilayahnya, melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan POS AN, melaporkan pelaksanaan AN tingkat provinsi untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, melakukan desiminasi hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya, dan melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya.

Sebagai rangkaian kegiatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan asesmen nasional, diantaranya kegiatan pendampingan implementasi pedoman peningkatan literasi dan numerasi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di

kabupaten/kota dengan tujuan sekolah memahami strategi gerakan literasi numerasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Selanjutnya LPMP Sultra juga melaksanakan kegiatan pemetaan dan analisis kebutuhan penguatan sarana per wilayah dan potensi lokal, dimana ketersediaan sarana TIK menjadi faktor utama dalam pelaksanaan asesmen nasional yang sangat berpengaruh pada penentuan sekolah yang akan melaksanakan secara mandiri, mandiri dan ditumpangi, dan yang menumpang. Diharapkan kegiatan ini dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga pihak sekolah dapat mempersiapkan diri dengan maksimal dalam melaksanakan asesmen nasional dengan baik. Simulasi dan Pendampingan AN jenjang Dikmen juga dilaksanakan LPMP Sultra dengan beberapa sekolah dikmen di kab/kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan harapan dapat mendampingi dan memberi alternatif solusi permasalahan teknis asesmen nasional.

Kegiatan LPMP Sultra selanjutnya dalam mendampingi pelaksanaan ANBK, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan ke beberapa sekolah di kab./kota di wilayah Sulawesi Tenggara, untuk jadwal pelaksanaan ANBK yang pertama dilaksanakan pada jenjang SMK/MAK/Paket C dan yang sederajat. Seperti monev di SMK 1 Tirawuta Kab. Kolaka Timur yang diselenggarakan tanggal 20 – 23 September 2021, dikunjungi oleh Kepala LPMP Sultra, Drs. Sakkangi, M.Pd. Dalam kunjungannya terlihat siswa /siswi SMKN 1 Tirawuta sangat bersemangat dalam pengerjaannya. Namun dalam pelaksanaan pada hari pertama mengalami kendala jaringan di saat sesi kedua, karena di sekolah tersebut menggunakan sistem daring sebagaimana yang dijelaskan oleh proktor SMKN 1 Tirawuta, Ilham Nur. Hal ini juga dialami oleh SMKN 1 Loea Kabupaten Kolaka Timur, menurut keterangan proktornya, Halim Abdul Said, dimana dalam satu hari dilaksanakan sebanyak tiga sesi karena status pelaksanaan kategori mandiri ditumpangi, namun dari sejak sesi pertama sudah mengalami kendala jaringan karena juga menggunakan sistem daring. *Provider* yang digunakan menggunakan telkomsel. Kegiatan monev ini dilaksanakan untuk melihat langsung proses pelaksanaan ANBK di lapangan. Dengan harapan yang menjadi salah satu program pemerintah di sekolah pelaksanaan ANBK dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya dapat dilihat kualitas mutu pembelajaran di sekolah tersebut.- Tim Publikasi



# LPMP Prov. Sultra Bersama BP- PAUD & Dikmas Sultra Gelar Sosialisasi PSP Angkatan Kedua

Kartini, S.Si, M.Si

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi - LPMP Prov. Sultra

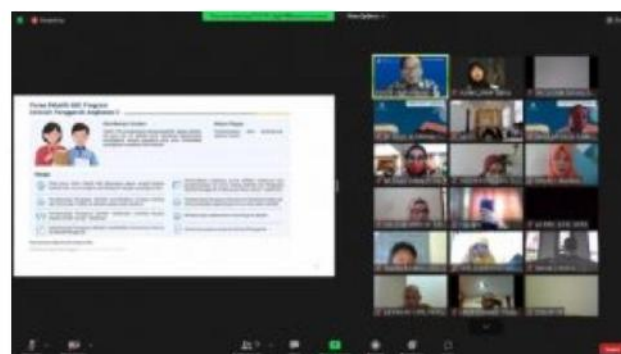
Program sekolah penggerak ini merupakan episode ke 7 dari merdeka belajar yang diluncurkan pertama kali pada tanggal 1 februari 2021. Program Sekolah Penggerak diluncurkan sebagai upaya untuk melaksanakan visi pendidikan Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil Pelajar Pancasila dan berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program sekolah penggerak atau yang lebih sering kita sebut PSP, pada angkatan pertama, Kemendikbudristek berhasil melahirkan 2.500 sekolah penggerak di 34 provinsi yang meliputi 111 kabupaten/kota sasaran tahun 2021. Untuk Sulawesi tenggara sejumlah 41 sekolah telah dinyatakan lulus sebagai sekolah pelaksana sekolah penggerak yang berasal dari kabupaten Kolaka utara, Buton dan Buton tengah.

Berdasarkan surat edaran dari Dirjen Paudikdasmen perihal Penetapan Kabupaten/Kota Penyelenggara PSP Angkatan Kedua, menyebutkan bahwa proses seleksi pada kabupaten/kota calon penyelenggara PSP angkatan kedua, dari 34 provinsi dan 139 kabupaten/kota penyelenggara PSP angkatan kedua terpilih 5 kabupaten/kota yaitu Kab. Bombana, Buton Selatan, Kolaka Timur, Muna dan Kota Baubau.

Sebagai rangkaian dari Program Sekolah Penggerak Tahun 2021 yang dicetuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Prov Sultra Bersama BP PAUD Dikmas Prov Sultra, selama 4 hari menyelenggarakan Sosialisasi Pendaftaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 secara daring mulai tanggal 6, 7, 9 dan 10 September 2021.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan Kemendikbud melalui LPMP Prov Sultra Bersama BP PAUD Dikmas Prov Sultra, informasi seputar Program Sekolah Penggerak dan tahapannya, bagaimana tahapan yang sudah dilaksanakan, juga informasi tentang seleksi calon kepala sekolah penggerak,” ujar Kepala LPMP Prov Sultra, Drs. Sakkangi, M.Pd dalam paparannya. Sakkangi juga menyampaikan Program Sekolah Penggerak merupakan: 1) Program kolaborasi antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama; 2) Intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah; 3) Memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta; 4) Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri; 5) Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.





Menyambung paparan dari Kepala LPMP Prov Sultra, Kepala BP PAUD Dikmas Prov Sultra Drs. Harisman, M.Pd juga menyampaikan hal yang penting yaitu, “Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan : 1) Pendampingan konsultatif dan asimetris, Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak; 2) Penguatan SDM sekolah, Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud; 3) Pembelajaran dengan paradigma baru, Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas; 4) Perencanaan berbasis data, Manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah ; 5) Digitalisasi sekolah, Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan.

Sosialisasi Program Sekolah Penggerak ini menggunakan fasilitas video conference, melibatkan unsur Dinas Pendidikan Prov. Sultra, Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Kolaka Timur, Baubau, Buton Selatan, Muna, Buton, Kolaka Utara dan Buton Tengah dan para kepala sekolah asal kabupaten tersebut dari jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA sebagai peserta sosialisasi.

Paparan materi tiap sesi melibatkan 3 narasumber yang berasal dari unsur, LPMP Prov Sultra, BP PAUD Dikmas Prov Sultra dan Direktorat Jenderal GTK Kemdikbudristek. Junaidin Pagala, Ari Sudono, La Mashuri, dan Isnawati Abbas adalah narasumber dari LPMP Prov Sultra serta Etika Rosita, Rasid dan Hamim dari BP PAUD & Dikmas Prov Sultra memaparkan materi terkait Kebijakan dan pengenalan program sekolah penggerak. Sigit Wibowo, Mansyur, Rita DS, Yudi Herman tim program sekolah penggerak dari Direktorat Jenderal GTK Kemdikbudristek membawakan materi Mekanisme Seleksi Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak. Materi teknis terkait tata cara pendaftaran KS pada Program Sekolah Penggerak di dipaparkan oleh Andhika Musolini, Nasir dan Suyana.

Diharapkan melalui sosialisasi Program Sekolah Penggerak, jalinan kerja sama antara Pemerintah Pusat (Kemendikbud) dengan pemerintah daerah semakin erat, dan selaras dalam menjalankan kebijakan dan program peningkatan mutu pendidikan di wilayah masing. Kepala LPMP Prov Sultra dan Kepala BP PAUD Dikmas Prov Sultra meminta pihak dinas dapat mengumpulkan para kepala sekolah baik negeri maupun swasta, baik PNS maupun non-pns untuk menyosialisasikan program ini. Semakin banyak yang mendaftar tentu akan semakin bagus. Karena dengan banyaknya calon kepala sekolah menggerakkan maka akan lebih mudah memilih calon kepala sekolah yang terbaik. - Tim Publikasi

**KEMDIKBUDRISTEK**  
**SOSIALISASI PENDAFTARAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**  
**JENJANG SMA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
 • Kab. Bau Bau • Kab. Bombana  
 • Kab. Buton • Kab. Kolaka Timur  
 • Kab. Buton Tengah • Kab. Kolaka Utara  
 • Kab. Buton Selatan • Kab. Muna

Senin, 6 September 2021  
 08.30- 12.00 WITA  
<https://bit.ly/sosialisasi-PSP2-2021>  
 Meeting ID: 781 400 3108  
 Passcode: psp2

**Sigit Wibowo**  
 Ditjen GTK Kemdikbudristek

**Junaidin Pagala**  
 LPMP Sulawesi Tenggara

**Andhika Musolini**  
 Ditjen GTK Kemdikbudristek

**Rizaputra**  
 BP PAUD dan Dikmas Sultra

**KEMDIKBUDRISTEK**  
**SOSIALISASI PENDAFTARAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**  
**JENJANG PAUD, SD, DAN SMP**  
**KABUPATEN BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Senin, 6 September 2021  
 13.00- 15.30 WITA  
<https://bit.ly/sosialisasi-PSP2-2021>  
 Meeting ID: 781 400 3108  
 Passcode: psp2

**Mansyur**  
 Ditjen GTK Kemdikbudristek

**Etika Rosita**  
 BP PAUD dan Dikmas Sultra

**Andhika Musolini**  
 Ditjen GTK Kemdikbudristek

**Kartini**  
 LPMP Sulawesi Tenggara

**KEMDIKBUDRISTEK**  
**SOSIALISASI PENDAFTARAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**  
**JENJANG PAUD, SD, DAN SMP**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Selasa, 7 September 2021  
 08.30- 12.00 WITA  
<https://bit.ly/sosialisasi-PSP2-2021>  
 Meeting ID: 781 400 3108  
 Passcode: psp2

**Mansyur**  
 Ditjen GTK Kemdikbudristek

**Rasid**  
 BP PAUD dan Dikmas Sultra

**Nasir**  
 Ditjen GTK Kemdikbudristek

**La Mashuri**  
 LPMP Sulawesi Tenggara



# Seleksi Kompetensi Tahap I PPPK Guru Libatkan LPMP Prov. Sultra sebagai Pengawas Utama



Kartini, S.Si, M.Si

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi - LPMP Prov. Sultra

**G**uru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan perhitungan Dapodik bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri, di luar guru yang berstatus PNS yang saat ini mengajar, mencapai satu juta guru. Jumlah guru PNS yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 % (enam puluh persen) dari jumlah kebutuhan seharusnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Oleh karena hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan PPPK untuk JF Guru.

Pelaksanaan seleksi Kompetensi tahap 1 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan 41 TUK (tempat ujian kompetensi) di 41 sekolah SMA/SMK/SMP yang berada pada 17 kabupaten/kota dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK)*. Ujian berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 s.d. 17 September 2021, tiap hari dibagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 di mulai dari pukul 07.00 WITA sampai 10.50 WITA dan sesi 2 mulai pukul 13.00 WITA sampai 16.50 WITA.

LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara dan BP PAUD Provinsi Sulawesi Tenggara selaku UPT Kemdikbudristek di Provinsi Sulawesi Tenggara terlibat sebagai pengawas utama di 41 TUK, 28 TUK pengawas utama dari LPMP dan 13 TUK pengawas utamanya dari BP PAUD & Dikmas. Pengawas utama akan bertugas menjadi wakil

panitia pusat dalam pelaksanaan seleksi kompetensi, berada di lokasi untuk mengawasi, mensupervisi dan memastikan pelaksanaan ujian kompetensi berjalan dengan baik yang dimulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan seleksi kompetensi, pengawas utama dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ditemukan adanya kendala atau permasalahan pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi berlangsung.

Seleksi Guru ASN PPPK dilaksanakan ditengah mewabahnya covid-19 sehingga wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, dengan persyaratan yakni peserta harus membawa hasil tes rapid antigen dengan hasil non reaktif/negatif yang dilakukan H-1 sebelum seleksi kompetensi, peserta harus menggunakan masker medis/masker kain 3 lapisan/masker KN95 serta direkomendasikan penggunaan pelindung wajah (face shield) atau memakai masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar (double mask), peserta juga harus menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, sebelum memasuki ruang ujian peserta diwajibkan ukur suhu tubuh dan mencuci tangan dengan sabun/disinfektan (hand sanitizer).



Dokumentasi. Pengukuran suhu tubuh peserta sebelum pelaksanaan PPPK Guru tahap 1 Kab. Konawe



Seleksi Kompetensi tahap I ini diperuntukkan bagi THK-II sesuai dengan pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan terdaftar di Dapodik. Pelamar seleksi kompetensi I wajib untuk memilih formasi di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, yang sesuai dengan kualifikasi akademik/sertifikat pendidik. Apabila tidak tersedia formasi yang sesuai di sekolahnya, pelamar diarahkan untuk memilih formasi yang sesuai pada sekolah lain dalam satu daerah sesuai dengan kewenangan pengelolaan pendidikan.

Setelah pelaksanaan seleksi kompetensi tahap I pengumuman dan masa sanggah hasil seleksi kompetensi I pelamar pada seleksi kompetensi I yang dinyatakan lulus akan diumumkan secara terbuka melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>. Pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi kompetensi I, dapat mengajukan sanggahan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari sejak

diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan/memperbarui dokumen lamaran. Selanjutnya panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi kembali hasil seleksi kompetensi I yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id> paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru dapat dibaca melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru dapat dibaca melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>. Bagi bapak/ibu peserta ujian PPPK dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. - Tim Publikasi

## Dokumentasi Pelaksanaan PPPK Guru Tahap 1 Kab. Konawe



Pemeriksaan dokumen peserta



Antran peserta di depan ruang ujian



Penyampaian tata tertib dan arahan kepada peserta



Arahan dari pengawas ruang sebelum ujian



Verifikasi identitas peserta dan pembagian kartu login sebelum masuk ruang ujian



Pelaksanaan ujian PPPK Guru Tahap 1





pelaksanaan Choaching Klinik PSP Kab. Kolaka Timur

## LPMP Prov. Sultra Bersama BP-PAUD Dikmas Sultra Laksanakan Choaching Klinik

Soesiana Ariani, S.Pd, M.Si

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi - LPMP Prov. Sultra

**D**alam rangka implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan Kedua, LPMP Prov. Sultra dan BPPAUD Dikmas Sultra melaksanakan kegiatan Choaching Klinik Pendaftaran Program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua kepada para Kepala Sekolah Jenjang TK, SD, SMP, dan SMA se-Kab. Kolaka Timur secara tatap muka dengan protokol kesehatan 3M pada hari Selasa, 21 September 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN 1 Tirawuta, yang terbagi menjadi 2 sesi dengan ruang terpisah berdasarkan jenjang. Ruang 1 diisi oleh jenjang SD, SMP dan SMA, sedangkan Ruang 2 diisi oleh jenjang TK. Sesi pertama di hadiri enam kecamatan yaitu Kecamatan Poli-polio, Dangia, Aere, Loea, Lambandia, dan Ladongi, sedangkan sesi kedua dihadiri Kecamatan Tinondo, Tirawuta, Mowewe, Lalolac, Uuesi, dan Uluiwoi. Jumlah sekolah yang hadir dikedua sesi sebanyak 145 sekolah untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini membahas tata cara pendaftaran PSP angkatan kedua. Dengan harapan sekolah memahami cara pendaftaran PSP.

Selanjutnya kegiatan ini dibuka Kabid Dikdas Kab. Koltim, Hj.Sitti Madinah, M.Pd, kemudian dilanjutkan pengarahan dari Kepala LPMP Prov. Sultra, Drs. Sakkangi, M.Pd yang menyampaikan bahwa Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan: 1) Program kolaborasi antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama; 2) Intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah; 3) Memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak

hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta; 4) Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri; 5) Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak. Kegiatan berikutnya dilakukan simulasi cara pendaftaran PSP oleh Badiang, S.Pd dari SMPN 1 Poli-polio yang diperkuat dengan penjelasan PSP oleh Dr. La Mashuri, S.Pd, M.Si bahwa Program Sekolah Penggerak diluncurkan sebagai upaya untuk melaksanakan visi pendidikan Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil Pelajar Pancasila dan berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).-  
-TimPublikasi



Penyajian materi pendaftaran program sekolah penggerak



# **Program Organisasi Penggerak**

## **Paradigma Perubahan Pendidikan**

### **Menuju Indonesia Maju**



**Dr. La Mashuri, S.Pd, M.Si**  
 Analis Mutu Pendidikan - LPMP Prov. Sultra  
 Pengawas Pendamping Lapangan (PPL) POP  
 Prov. Sultra dan Sulbar

*.....Paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berubah, yaitu akan jauh lebih gotong royong, kita akan menggerakkan sekolah dengan Program Organisasi Penggerak....Hasil Asesmen Nasional sekolah yang diintervensi oleh organisasi penggerak harus di atas rata – rata di banding sekolah lain di daerahnya.....Organisasi masyarakat harus mampu menunjukkan strategi, pendekatan, metode dalam program kegiatan peningkatan mutu sehingga hal tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan utamanya sekolah.....Organisasi Penggerak membantu Indonesia dalam pendidikan..... (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Makarim dalam peluncuran program merdeka belajar episode 4 : Program Organisasi Penggerak, 10 Maret 2020)*

#### **A. Apakah Program Organisasi Penggerak Itu?**

Program merdeka belajar episode ke empat adalah Program Organisasi Penggerak (POP). Program organisasi penggerak merupakan program yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan Indonesia yang berdaya dan memberdayakan. Program Organisasi Penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak dilakukan dengan melibatkan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama

organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah, dengan tujuan meningkatnya kemampuan profesional para pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Secara umum Program Organisasi Penggerak (POP) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan peran serta organisasi kemasyarakatan (Ormas) bidang pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara menyeluruh dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini tentunya diperlukan sinergitas yang dilaksanakan antara Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Ormas yang berpartisipasi dalam POP telah memiliki praktik baik dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Arah kebijakan melalui POP melibatkan berbagai pihak yang bergerak dan bersinergi dalam satu pola pikir yang sama antara masyarakat, sekolah, dan pemangku kebijakan untuk menjadi ekosistem pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar. Fokus pelaksanaan POP pada penguatan literasi, numerasi, dan/atau penguatan karakter. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut ditentukan oleh masing-masing Ormas sesuai dengan desain dan/atau hasil praktik baik yang sudah dilakukan.

#### **B. Tipe Organisasi Penggerak berdasarkan Hibah Pendanaan dan Sekolah Sasaran**

Dalam melaksanakan POP, Ormas dapat menggunakan dana bantuan pemerintah dan/atau biaya mandiri yang berasal dari Ormas atau pihak lainnya. Ormas yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga





Gambar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Makarim dalam Peluncuran Program Merdeka Belajar Episode 4 : Program Organisasi Penggerak

kependidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar menggunakan dana bantuan pemerintah yang telah diterima dari Direktorat Pendidikan Profesi Dan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan. Dana bantuan pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan hibah pendanaan dan jumlah sekolah sasaran intervensi, type organisasi penggerak dikategorikan menjadi 3 (tiga) dengan menggunakan nama hewan, yaitu gajah, macan dan kijang.

**Program Gajah.** Program yang dapat diikuti oleh organisasi yang sudah memiliki pengalaman merancang dan mengimplementasikan program bidang pendidikan. Organisasi yang mengikuti 'Program Gajah' harus bisa menunjukkan rekam jejak program yang pernah mencapai peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah dan peningkatan dampak pada hasil belajar siswa. Bukti dampak tersebut harus ditunjukkan secara kuantitatif. Organisasi yang mengikuti 'Program Gajah' akan mendapatkan bantuan pemerintah selama dua (2) tahun dari 2021-2023 untuk menjalankan program di lebih dari 100 PAUD/SD/SMP.

**Program Macan.** Program yang dapat diikuti oleh organisasi yang sudah memiliki pengalaman merancang dan mengimplementasikan program bidang pendidikan. Organisasi yang mengikuti 'Program Macan' harus bisa menunjukkan rekam jejak program yang pernah mencapai peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktek mengajar guru dan kepala sekolah. Bukti dampak tersebut harus

ditunjukkan secara kuantitatif. Organisasi yang mengikuti 'Program Macan' akan mendapatkan bantuan pemerintah selama dua (2) tahun dari 2021-2023 untuk menjalankan program di 21-100 PAUD/SD/SMP.

**Program Kijang.** Program yang dapat diikuti oleh organisasi yang sudah pengalaman merancang dan mengimplementasikan program bidang pendidikan. Organisasi yang mengikuti 'Program Kijang' harus bisa menunjukkan bidang pendidikan. Organisasi yang mengikuti bidang pendidikan. Organisasi yang mengikuti rekam jejak program. Bukti dampak kuantitatif atau kualitatif akan memperkuat potensi untuk diterima dalam Program Organisasi Penggerak. Organisasi yang mengikuti 'Program Kijang' akan mendapatkan bantuan pemerintah selama dua (2) tahun dari 2021-2023 untuk menjalankan program di 5-20 PAUD/SD/SMP.

### C. Tipe Intervensi Ormas kepada Sekolah

Intervensi ormas yang menjadi fokus peningkatan mutu pada sekolah – sekolah sarannya dikategorikan menjadi 6 (enam) tipe, yaitu :

#### (1) Intervensi Ormas Tipe 1 : Pengetahuan Substansi Guru

Intervensi tipe 1 berfokus pada pelatihan guru yang hanya mencakup materi pelajaran tertentu dan tidak mencakup keterampilan mengajar. Keluaran yang ingin dicapai dengan adanya intervensi ini adalah (a). Isi RPP selaras dengan kurikulum dan konteks lokal serta memperhatikan





latar belakang siswa, (b). Guru memahami keterampilan abad 21 dan keterampilan berpikir kritis dan memasukkan kegiatan untuk mengembangkan keterampilan ini dalam RPP.

## (2) Intervensi Ormas Tipe 2 : Keterampilan Pedagogis Guru

Intervensi tipe 2 berfokus pada pelatihan langsung kepada guru tentang keterampilan pedagogis dengan isi mata pelajaran sebagai materi pelengkap. Keluaran yang ingin dicapai dengan adanya intervensi ini adalah (a) Manajemen kelas dan lingkungan pembelajaran yang positif, (b). Siswa merupakan peserta aktif dalam proses pembelajaran, (c). Penilaian, umpan balik dan pelaporan

## (3) Intervensi Ormas Tipe 3 : Pengembangan Keprofesian Guru

Intervensi tipe 3 berfokus pada pelatihan komprehensif untuk guru termasuk keterampilan pedagogis, pengetahuan konten, keterampilan guru lainnya (misalnya: manajemen perilaku siswa, keterampilan komunikasi, dan lain – lain. Keluaran yang ingin dicapai dengan adanya intervensi ini adalah (a) Guru bertanggung jawab atas pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dan pengembangan karier mereka sendiri, (b) Guru mendemonstrasikan moralitas, kematangan emosi dan spiritual serta bertindak sesuai dengan kode etik, (c) Guru menampilkan praktik kerja yang berfokus pada siswa, (d) Guru berkolaborasi di dalam dan di luar sekolah untuk saling mendukung dan mengembangkan diri, (e) Kepala sekolah memberikan dukungan dalam pengembangan keprofesian Guru.

## (4) Intervensi Ormas Tipe 4 : Supervisi dan Bimbingan Akademik

Intervensi tipe 4 berfokus pada pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru mentor mengenai cara membimbing dan memberikan umpan balik tentang perencanaan pelajaran, implementasi, dan penilaian. Keluaran yang ingin dicapai dengan adanya intervensi ini adalah (a) Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengembangan keprofesionalan berkelanjutan secara mandiri, (b) Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memimpin pengembangan keprofesionalan berkelanjutan semua staf di sekolah, (c) Kepala sekolah menunjukkan iman dan komitmen moral mereka terkait bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain dan bagaimana mereka mengelola sekolah.

## (5) Intervensi Ormas Tipe 5 : Keterampilan Manajemen Dan Kepemimpinan Yang Komprehensif Untuk Kepala Sekolah

Intervensi tipe 5 berfokus pada pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru mentor mengenai cara membimbing dan memberikan umpan balik tentang perencanaan pelajaran, implementasi, dan penilaian. Keluaran yang ingin dicapai dengan adanya intervensi ini adalah (a) Kepala sekolah bertanggung jawab atas lingkungan sekolah, (b) Kepala sekolah memimpin pengembangan program sekolah agar berdampak positif bagi siswa, (c) Kepala sekolah mengelola program dan sumber daya sekolah untuk mendukung pembelajaran siswa memimpin pengembangan program sekolah agar berdampak positif bagi siswa, (c) Kepala sekolah mengelola program dan sumber daya sekolah untuk mendukung pembelajaran siswa.



## (6) Intervensi Ormas Tipe 6 : Reformasi Sekolah yang Komprehensif (Kepala Sekolah, Guru, Komunitas)

Intervensi tipe 6 berfokus pada intervensi yang menargetkan beberapa (> 2) pemangku kepentingan sekolah, tidak hanya melibatkan guru dan kepala sekolah, dan proses belajar mengajar (yaitu keterlibatan masyarakat, dan lain - lain). Keluaran yang ingin dicapai dengan adanya intervensi ini adalah (a) Evaluasi kolaboratif dan perencanaan untuk perbaikan sekolah, (b). Kepala sekolah mengembangkan keterlibatan dan kemitraan masyarakat di luar sekolah.

### D. Pengendalian Program POP

Dalam rangka menjamin keterlaksanaan program sesuai dengan pedoman organisasi penggerak dan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pendampingan kepada Ormas pelaksana POP yang dilakukan oleh Pengawas Pendamping Lapangan (PPL) dan Pendamping Lapangan (PL). Untuk keperluan tersebut, pemerintah merekrut dan melaksanakan seleksi untuk menjadi PPL dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan seluruh Indonesia dan PL dari pengawas, kepala sekolah dan guru di seluruh Indonesia.

PPL bertanggung jawab kepada Direktur PPPGTK dan bertugas dalam (a) melakukan pemantauan kegiatan terkait tugas dan tanggung jawab PL, (b) melakukan verifikasi administrasi dan pelaporan, (c) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program intervensi dan kesesuaian realisasi anggaran yang telah direncanakan dengan target yang ditetapkan oleh ormas pelaksana POP, (d) menjadi narahubung antara Ormas pelaksana POP dan Direktorat PPPGTK; dan, (e) mengkonsultasikan kendala dan masalah dalam pelaksanaan program kepada Direktur PPPGTK. Sedangkan PL yang juga bertanggung jawab kepada Direktur PPPGTK dan bertugas dalam :

#### (1) Asistensi

Tugas – tugas yang termasuk dalam asistensi adalah sebagai berikut (a) memastikan ormas pelaksana POP telah menyusun perencanaan rinci dari program intervensi, termasuk anggaran dan jadwal; (b) mendampingi Ormas pelaksana POP melaksanakan program intervensi sesuai dengan jadwal; (c) memberikan masukan dan rekomendasi kepada ormas pelaksana POP sebagai

bahan pertimbangan korektif jika terdapat penyimpangan pada pelaksanaan program; (d) mendampingi ormas pelaksana POP dalam merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi.

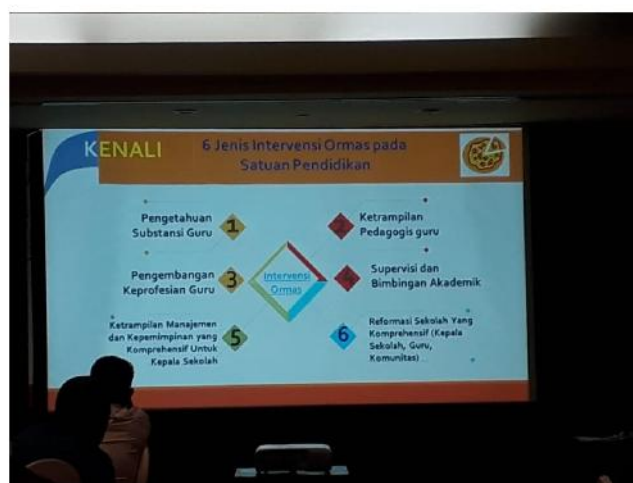
#### (2) Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh PL berdasarkan kunjungan secara acak ke satuan pendidikan sasaran ormas pelaksana POP melalui (a) pemantauan terhadap pelaksanaan program intervensi dan kesesuaian realisasi anggaran yang telah direncanakan dengan target yang ditetapkan; (b) pemantauan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program; (c) pengecekan kesesuaian informasi pelaksanaan program intervensi, kesesuaian realisasi anggaran dan jangkauan penerima manfaat pada laporan bulanan ormas pelaksana POP dengan bukti yang ada; (d) pengambilan data dampak program intervensi pada satuan pendidikan sasaran ormas pelaksana POP.

#### (3) Koordinasi dan Pelaporan

Tugas – tugas yang termasuk dalam koordinasi dan pelaporan adalah sebagai berikut (a) melakukan koordinasi dengan PPL; (b) melaksanakan koordinasi dengan ormas pelaksana POP dan pemangku kepentingan di kabupaten/kota; (c) membuat laporan rutin perencanaan/persiapan dan kendala pelaksanaan program intervensi di lapangan.

Semoga program organisasi penggerak ini terlaksana dengan baik dan menjadi salah satu indikator *Paradigma Perubahan Pendidikan Menuju Indonesia Maju*.



Penyajian materi Bimtek PL - PPL POP Tahun 2021 di Hotel Milenium Jakarta



## Referensi

.....2021. *Panduan Teknis Pendampingan Lapangan Pada Program Organisasi Penggerak*. Direktorat Pendidikan Profesi Dan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Jakarta.

.....2021. *Panduan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah Program Organisasi Penggerak Untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*. Direktorat

Pendidikan Profesi Dan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Jakarta.

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/orga-nisasipenggerak/pertanyaan-sering-ditanyakan/>

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/orga-nisasipenggerak/tipe-program-organisasi-penggerak/>

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/orga-nisasipenggerak/>

## Serba-serbi Bimtek PL - PPL POP Tahun 2021 di Hotel Milenium Jakarta





# Efektivitas Media Pembelajaran My Cho Pic dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Descriptive Text pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris

Siti Yulaikhah, M.Pd  
Guru SMPN 2 Depok

Dalam penguasaan keterampilan menulis, peserta didik diharuskan terampil menuliskan teks pendek dan sederhana yang telah diajarkan. Hal ini membutuhkan waktu latihan dan praktik yang teratur sehingga mereka bisa menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami oleh pembacanya. Namun pencapaian keterampilan menulis peserta didik masih belum optimal. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam kelas virtual (pembelajaran jarak jauh), ada beberapa masalah yang terjadi pada pembelajaran Bahasa Inggris, khususnya pembelajaran menulis (*writing*), seperti:

1. Penggunaan kata yang kurang variatif dalam membentuk sebuah kalimat. Beberapa kata yang sering ditemukan adalah *play, beautiful, handsome, stupid, dan writing*.
2. Kesalahan dalam penggunaan *to be* dalam kalimat, seperti yang terlihat dalam kalimat seperti "*Toni and Joni is playing football*". *To be* yang tepat digunakan untuk kalimat di atas adalah *to be* untuk subjek yang plural, yaitu *are*.
3. Kesalahan penulisan sering ditemui, seperti kurang menuliskan huruf, penggunaan huruf yang salah, dan kesalahan penulisan lainnya seperti yang terlihat dalam contoh: "*John is holding a toy car and Natalie siting on the sand*". Kata yang digaris bawah seharusnya ditulis *sitting*. "*My dad always starts his day by drinking kaffi*". Kata yang digaris bawah seharusnya ditulis *coffee*.
4. Penggunaan perangkat penerjemah seperti Google Translator banyak dijumpai dalam kalimat yang dibuat siswa.

Penggunaan perangkat penerjemah memungkinkan terjadinya perubahan tenses

yang digunakan. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman peserta didik dalam memahami penggunaan tenses dalam Bahasa Inggris.

Pada kalimat *James dan Nicky sedang mengendarai sepeda sekarang*. Tenses atau keterangan waktu yang digunakan adalah *Present Continuous Tense*. Namun saat kalimat ini diterjemahkan dengan menggunakan perangkat penerjemah seperti Google Translator, tenses yang digunakan akan berubah menjadi *Past Continuous Tense*.

"*James and Nicky are riding bikes now*". Tenses *Present Continuous* (Terjemahan kamus).

"*James and Nicky were riding bikes*". Tenses *Past Continuous* (Terjemahan perangkat penerjemah).

Kesalahan ini dapat mengakibatkan peserta didik tidak dapat membedakan penggunaan *Present Continuous Tense*, yang digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung, dengan *Past Continuous Tense*, tenses yang digunakan untuk kejadian yang telah berlangsung di waktu lampau.

5. Pemilihan kosa kata yang tidak tepat, seperti yang terlihat pada kalimat berikut. "*Aurel is telephoning her mother*". Kata yang tepat untuk kata menelepon dalam Bahasa Inggris adalah *calling*.

Jadi, kalimat yang tepat untuk menerjemahkan Aurel menelepon ibunya adalah: *Aurel is calling her mother*.



## Media Gambar

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang bisa menjadi solusi dalam permasalahan ini. Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa. Terlebih di masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran, agar materi bisa diterima dengan baik oleh peserta didik, walaupun pembelajaran dilakukan secara virtual. Hal ini sesuai dengan Chatib (2012: 169-170) yang mengatakan:

“Hasil belajar tidak hanya terbatas pada tes atau ujian saja tetapi sangat luas. Hasil belajar dapat dilihat dari; a) perubahan perilaku anak; b) perubahan pola pikir anak; c) membangun konsep baru”.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi pilihan utama sejak Pembelajaran Jarak Jauh diterapkan. Pembelajaran dilakukan secara online dengan menggunakan sarana pertemuan virtual seperti *Zoom Cloud Meeting*, *Google Meet*, *YouTube video*, dan media online lainnya. Penggabungan antara media yang dimiliki peserta didik dan guru dengan media yang bisa diakses secara online diharapkan akan menambah keberhasilan pencapaian kemampuan berbahasa Inggris para peserta didik.

Gambar merupakan salah satu media yang mempunyai kekuatan dan dianggap dapat memancing peserta didik untuk lebih kreatif dan membantu mereka dalam menghasilkan tulisan yang baik. Sebuah gambar dapat memperjelas situasi imajinatif yang diberikan oleh guru dalam kelas. Mayer (2009) menyatakan bahwa media gambar adalah setiap bentuk grafis statis maupun dinamis antara lain: foto, grafis, denah, ilustrasi (yang terdiri dari dua atau lebih gambar), dan juga animasi atau kartun. Sementara itu, menurut Kusnandi dan Sutjipto (2013), media gambar adalah media yang berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indera penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan melalui simbol-simbol komunikasi visual. Media gambar mempunyai tujuan untuk menarik perhatian, memperjelas

materi, mengilustrasikan fakta dan informasi.

Berdasarkan perkembangan teknologi, Arsyad (2009: 29) mengelompokkan media pembelajaran ke dalam empat jenis yaitu media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audio-visual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan teknologi gabungan. Mudah-mudahan mendapatkan gambar baik secara langsung maupun dengan cara mengunduhnya dari internet menjadikan gambar menjadi media yang efektif dalam pembelajaran. Keefektifan penggunaan gambar sebagai media pembelajaran akan lebih optimal jika gambar yang digunakan sebagai media merupakan gambar pilihan dari peserta didik. Hal ini tentunya akan melibatkan imajinasi dan emosi mereka yang nantinya diharapkan membawa dampak positif dan peningkatan terhadap kemampuan menulis peserta didik.

### *My Cho Picture*

*My Cho Pic* adalah media pembelajaran berupa gambar yang dipilih sendiri (*Choice*) oleh peserta didik sebagai upaya meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris, terutama keterampilan menulis *descriptive text*. Peserta didik dapat membuat sendiri gambar tersebut ataupun mengunduhnya dari internet. Gambar yang dipilih disesuaikan dengan tema atau topik yang sedang dipelajari, seperti suasana di suatu tempat, kegiatan yang sedang dilakukan, serta kegiatan yang teratur dilakukan. Penggunaan *My Cho Pic* memungkinkan keterlibatan imajinasi dan emosi peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Dengan hal ini, diharapkan akan bisa meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menulis *descriptive text* pada pelajaran Bahasa Inggris.

Keampuan *My Cho Pic* dalam pembelajaran bahasa Inggris dibuktikan dengan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dengan subjek peserta didik kelas 8G, SMP Negeri 2 Depok dengan perolehan hasil belajar awal seperti pada tabel berikut.

No	Rentang Nilai	Kategori	Frekuensi	Jumlah Nilai	Persentase	Nilai Rata-rata
1	92-98	Sangat Baik	0	0		74,83
2	84-91	Baik	14	1408	40,00%	
3	76-83	Cukup	18	1152	51,43%	
4	0-75	Kurang	3	59	8,57%	
<b>TOTAL</b>			35	2619	100%	

Tabel 1. Hasil belajar sebelum tindakan





Dalam penguasaan keterampilan menulis, peserta didik diharuskan terampil menuliskan teks pendek dan sederhana.

Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak ada peserta didik yang mencapai nilai dengan kategori “Sangat Baik”. Sebanyak 40% mendapat nilai berkategori “Baik” dan persentase tertinggi, yaitu 51.43% ada pada nilai berkategori “Cukup” dengan rata – rata nilai sebesar 74,828514 sedangkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan adalah 76.

Setelah diberikan tindakan dengan menggunakan media pembelajaran *My Cho Pic* sebanyak dua siklus, hasil belajar siswa menunjukkan kemajuan seperti yang terlihat pada tabel 1 dan tabel 2 berikut.

No	Rentang Nilai	Kategori	Frekuensi	Jumlah Nilai	Persentase	Nilai Rata-rata
1	92-98	Sangat Baik	0	0		79.74
2	84-91	Baik	20	2643	57.14%	
3	76-83	Cukup	15	148	42.86%	
4	0-75	Kurang	0	0	0.00%	
<b>TOTAL</b>			35	2791	100%	

Tabel 2. Hasil belajar siswa pada tindakan ke-1

Tabel 2 menunjukkan peningkatan hasil belajar peserta didik setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media *My Cho Pic*. Dari hasil di atas, dapat dipahami bahwa terdapat peningkatan nilai dibandingkan dengan nilai pada pembelajaran sebelumnya tanpa menggunakan media *My Cho Pic* dimana 20 (57.14%) peserta didik mendapatkan nilai berkategori 'Baik' dengan nilai antar 84-91. Namun demikian, masih ada 15 orang peserta didik yang belum mencapai nilai KKM.

No	Rentang Nilai	Kategori	Frekuensi	Jumlah Nilai	Persentase	Nilai Rata-rata
1	92-98	Sangat Baik	33	3340	94.28%	95.43
2	84-91	Baik	2	6580	5.71%	
3	76-83	Cukup	0	0	0.00%	
4	0-75	Kurang	0	0	0.00%	
<b>TOTAL</b>			35	9920	100%	

Tabel 3. Hasil belajar siswa setelah tindakan ke-2

Tabel 3 merupakan hasil belajar peserta didik setelah tindakan pembelajaran dengan menggunakan *My Cho Pic*, yang menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. Nilai rata-rata yang semula 79.74 meningkat menjadi 95.42. Nilai yang diraih peserta didik sudah mencapai presentase 94.2% berkategori “Sangat Baik” dan tidak ditemui peserta didik dengan nilai di bawah KKM. Dapat dipastikan peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan dalam keterampilan menulis mereka, terutama menulis *descriptive text*.

Dengan peningkatan nilai dari 74.82, dan nilai ketuntasan belum mencapai KKM 76, menjadi 95.42 serta berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran *My Cho Pic* dapat menjadi suatu pilihan guru dalam meningkatkan keterampilan menulis *descriptive text* peserta didik dalam Bahasa Inggris.

**Referensi:**

Arsyad, A. (2011). *Media pembelajaran*: Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Chatib, M. (2012). *Orang tuanya Manusia: Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*. Bandung: Kaifa

Kusnandi, & Sujipto, . (2013). *Media Pembelajaran Manual dan Digital*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mayer, E. R., (2009). *Multimedia Prinsip-prinsip dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.





Surip Widodo, S.Si, M.M  
PTP Ahli Muda - LPMP Prov. Sultra

## Cornell Note-Taking Dalam Pembelajaran Saintifik

Pembelajaran saat ini mengamanatkan pendekatan saintifik/ilmiah yang prosesnya terdiri terdiri lima pengalaman belajar pokok yaitu observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data kemudian mengkomunikasikan (Kemdikbud, 2014). Proses pembelajaran tersebut mengalami perubahan dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah (Kemdikbud, 2016) yang dapat mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan proses observasi yaitu membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Proses observasi mengutamakan kebermaknaan pembelajaran terhadap rasa ingin tahu siswa untuk menemukan fakta adanya hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran. Observasi memerlukan keterampilan pemahaman yang baik untuk menjamin bahwa proses pembelajaran selanjutnya akan berjalan dengan baik, karena siswa mampu memahami materi pembelajaran.

Proses observasi dalam pembelajaran saintifik akan efektif jika siswa melengkapi diri dengan dengan alat pencatatan. Menurut Piolat, Olive & Kellogg (2005), informasi dalam catatan bersifat ringkas sehingga siswa dapat dengan mudah mengingat lagi apa saja yang telah dia baca dari suatu sumber teks untuk menentukan rencana kedepan maupun belajar untuk persiapan ujian. Sebagai konsekuensinya, siswa harus mampu mendokumentasikan pembelajarannya dengan baik dan rapi dengan cara membuat catatan (*note-taking*). Kiewra (2002) menemukan bukti kuat bahwa siswa yang melakukan *note-taking* mengarah pada pencapaian hasil belajar yang lebih tinggi daripada yang tidak melakukannya. Hal itu sejalan dengan penelitian Tsai (2009) yang menyimpulkan siswa yang aktif dalam *note-taking* memiliki prestasi yang lebih baik dari pada yang pasif.

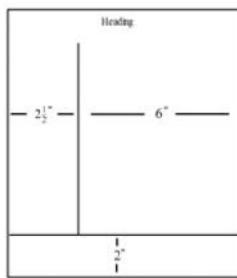
Untuk memahami makna dan fungsi *note-taking* dapat dilihat dari tinjauan para ahli. Di Vesta & Gray (1972) menyatakan *note-taking* berfungsi untuk mengkodekan dan menyimpan informasi secara eksternal untuk ditinjau ulang. *Note-taking* merupakan rangkaian dari keseluruhan proses penafsiran yang berurutan meliputi: pemahaman, analisis dan ekspresi ulang (Jones, 2002) yang bermanfaat bagi siswa sebagai teknik pembelajaran untuk revidu dan membantu mempelajari materi (Ward and Tatsukawa, 2003). Sedangkan Piolat, Olive & Kellogg (2005) mendefinisikan *note-taking* sebagai usaha seseorang untuk menghindari melupakan sesuatu melalui aktivitas kompleks yang membutuhkan pemahaman dan pemilihan informasi yang tepat untuk dituangkan dalam bentuk sistematis yang memiliki dua fungsi utama yaitu merekam informasi dan/atau untuk membantu refleksi. Hartley & Davies (2006) menyatakan *note-taking* dapat membantu meningkatkan konsentrasi siswa saat mendengarkan ceramah atau membaca teks yang membantu pelajar mengintegrasikan dan menguraikan yang didengar, dilihat, dibaca, atau diamati dengan pengetahuan sebelumnya yang digunakan sebagai alat peninjauan untuk meningkatkan daya ingat dan retensi.

Tersedia banyak metode *note-taking* yang masing-masing memiliki bentuk yang berbeda antara lain *Cornell*, *Outlining*, *Mind Mapping*, *Block*, dan *Modified Block* (Bouck, C. & Henderson, 2011). Tidak ada *note-taking* yang lebih unggul dari yang lain, semuanya efisien dan membuat proses revidu catatan ketika mempersiapkan ujian menjadi lebih mudah (Goodnotes, 2007).

*Cornell Note-Taking* merupakan salah satu metode yang populer, dibuat oleh Profesor Walter Pauk dari Universitas Cornell pada tahun 1940-an untuk membuat siswa aktif belajar dengan cara mencatat, mengatur dan revidu catatan. Struktur format *Cornell Note-Taking* mempunyai pola yang sistematis, sederhana, efisien, menghemat waktu/tenaga, dan mudah digunakan.



Konsep dan ide utama dengan mudah diperoleh dalam aktifitas mencatat, meringkas, dan mengatur catatan tanpa perlu menyalin ulang, serta pada saat siswa ingin membaca kembali catatan.



Gambar 1. Struktur *Cornell Note-Taking* (Sumber : Broc (2013))

Cara membuat format *Cornell Note-Taking* dengan membagi kertas sesuai ukuran pada gambar 1. Penjelasan fungsi masing-masing bagian yaitu 1) Bagian *Heading* untuk mencatat bibliografi secara rinci sumber materi berupa nama inisial/lengkap narasumber, judul buku/ artikel/video, URL, tahun, bulan, tanggal, dan lainnya; 2) Kolom di sebelah kanan disebut *Note-Taking Area* dengan lebar 6” digunakan untuk mencatat fakta dan ide gagasan utama media pembelajaran secara selektif serta menghindari kalimat panjang. Selanjutnya dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi; 3) Kolom di sebelah kiri yang lebarnya 2,5” disebut *Cue Column* untuk menuliskan kata-kata kunci dan komentar-komentar menggunakan frase, singkatan, dan simbol yang memudahkan tahap revidu catatan dan persiapan ujian; 4) Bagian bawah yang tingginya 2” adalah *Summary Area* untuk menuliskan refleksi seluruhan proses pembelajaran dalam bentuk ringkasan mencakup konsep utama *note-taking area* yang berguna untuk memahami tema pembelajaran dengan lebih baik. Langkah-langkah dalam *Cornell Note-Taking* diilustrasikan dalam gambar berikut :



Gambar 2. Tahapan *Cornell Note-Taking* (Sumber : Goodnotea (2017))

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, dibuat taksonomi berbentuk hierarki tujuan instruksional dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Taksonomi pertama kali dibuat oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Pada taksonomi Bloom tujuan tingkat yang lebih tinggi tidak dapat

diperoleh jika tujuan tingkat di bawahnya belum tercapai.

Taksonomi Bloom terdiri dari tiga domain, yaitu 1) Kognitif (*Cognitive*) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir; 2) Afektif (*Affective*) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri; 3) Psikomotor (*Psychomotor*) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin (Arikunto, 2012).

Pada tahun 2001 Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 melakukan revisi pada ranah kognitif taksonomi Bloom yang selanjutnya disebut Taksonomi Bloom Revisi.



Gambar 3. Ranah kognitif taksonomi Bloom (Sumber: Michael Orey (2010))

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001), ranah kognitif taksonomi Bloom terdiri dari enam jenis pola baru dimensi proses yang masing-masing mempunyai jenis aktivitas operasional yaitu 1) mengingat (*remembering*) : menemukan, mengenali, dan mengingat kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang; 2) memahami (*understanding*) : membangun makna dari pesan lisan, tertulis, dan grafis melalui interpretasi, contoh, klasifikasi, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan; 3) menerapkan (*applying*) : melaksanakan atau menggunakan prosedur melalui pelaksanaan, atau pelaksanaan; 4) menganalisis (*analyzing*) : memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian penyusunnya, menentukan bagaimana bagian-bagian itu berhubungan satu sama lain menjadi sebuah kesatuan satu tujuan melalui pembedaan, pengorganisasian, dan pengaitan; 5) mengevaluasi (*evaluating*) : membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar melalui pemeriksaan dan kritik; dan 6) mencipta (*creating*) : menyatukan unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang koheren atau fungsional serta reorganisasi elemen menjadi



pola atau struktur baru melalui pembangkitan, perencanaan, atau produksi.

Hartley and Davies (2006) menyatakan *note-taking* yang baik dan efektif memerlukan proses kognitif dan materi yang dicatat akan masuk dalam memori jangka panjang seseorang. Aktifitas pencatatan yang dituliskan pada *Note-Taking Area* dalam *Cornell Note-Taking*, termasuk dimensi proses mengingat (*remembering*) ranah kognitif taksonomi Bloom revisi.

Dalam pembelajaran bermakna, siswa berusaha mengkonstruksikan pengetahuan yang diperolehnya untuk memahami pengalaman-pengalaman mereka dengan cara membuat ringkasan yang dilakukan sebagai bagian strategi belajar metakognisi yang melibatkan pemahaman dan perhatian untuk memahami dan mengingat kembali materi yang pernah diajarkan di dalam kelas (Brown and Day, 1983). Meringkas merupakan kegiatan yang dituliskan pada *Summary Area* dalam *Cornell Note-Taking*, termasuk dimensi proses mengerti (*understanding*) ranah kognitif taksonomi Bloom revisi.

Format *Cornell Note-Taking* yang dapat diakses secara visual membuat proses pencatatan lebih efektif dan memungkinkan siswa memasukkan lebih banyak detail dalam ringkasan, sehingga informasi lebih lengkap (Makany, Kemp and Dror, 2008) karena semua siswa memiliki kerangka kerja yang sama untuk merekam catatan yang melalui pendekatan sistematis (Broe, 2013) dengan cara mendengarkan, membaca, mengatur, mengintegrasikan informasi yang diterima saat pembelajaran berlangsung (Stacy and Cain, 2015). *Cornell Note-Taking* membantu siswa belajar dengan baik dan memudahkan pencatatan yang efektif serta bermanfaat meningkatkan kepercayaan diri siswa (Evans and Shively, 2019).

Dari sudut pandang tujuan pembelajaran, *Cornell Note-Taking* sesuai dengan dimensi proses *remembering* dan *understanding* dalam domain kognitif taksonomi Bloom revisi. Sedangkan Bloom Karunananda, R Goldin & Talagala (2016) menyatakan *note-taking* dapat masuk domain keterampilan psikomotor.

Aktifitas membuat catatan dan ringkasan dalam *Cornell Note-Taking* merupakan aktifitas operasional pembelajaran saintifik pada proses observasi untuk menunjang pemahaman pada

proses menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan metode *Cornell Note-Taking* terbukti efektif membantu siswa mencatat, membuat pertanyaan, menemukan gagasan-gagasan penting, dan meringkas setiap materi yang diberikan oleh guru.

Akhir kata, *Cornell Note-Taking* dapat diimplementasikan dalam pembelajaran saintifik yang menggunakan media belajar teks, video, dan hipermedia; khususnya untuk siswa-siswa jenjang menengah.

### Referensi:

- Arikunto, S. (2012) *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baharev, Z. (2016) *The effects of Cornell note-taking and review strategies on recall and comprehension of lecture content for middle school students with and without disabilities*. doi: 10.7282/T3HD7XZ8.
- Bouck, C. & Henderson, K. (2011) *Transition Planning Considerations: A Strategy for Note Taking, Modules Addressing Special Education and Teacher Education (MAST)*. Greenville, NC: East Carolina University.
- Broe, D. (2013) 'The Effects of Teaching Cornell Notes on Student Achievement'.
- Brown, A. L. and Day, J. D. (1983) 'Macrorules for summarizing texts: the development of expertise', *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 22(1), pp. 1–14. doi: 10.1016/S0022-5371(83)80002-4.
- Evans, B. and Shively, C. T. (2019) 'Using the Cornell Note-taking System Can Help Eighth Grade Students Alleviate the Impact of Interruptions While Reading at Home', *Journal of Inquiry and Action in Education*, 10(Volume 10, Issue 1), p. 2019.
- Goodnotes (2017) *Cornell Note Taking — The Best Way To Take Notes Explained | by GoodNotes | GoodNotes Blog, Goodnotes*.



- Hartley, J. and Davies, I. K. (2006) 'Note taking: A critical review', *https://doi.org/10.1080/0033039780150305*, 15(3), pp. 207–224. doi: 10.1080/0033039780150305.
- Jones, R. (2002) *Conference interpreting explained, Conference Interpreting Explained*. Manchester, UK ;;Northampton, MA : St. Jerome Pub., Available at:
- Karunananda, A. S., R Goldin, P. and Talagala, P. D. (2016) 'Examining Mindfulness in Education', *International Journal of Modern Education and Computer Science*, 8(12), pp. 23–30. doi: 10.5815/IJMECS.2016.12.04.
- Kemdikbud (2014) 'Permendikbud 81A/2013 Implementasi Kurikulum 2013'. Kemdikbud, p.38.
- Kemdikbud (2016) 'Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah', p. 2016.
- Kiewra, K. A. (2002) 'How Classroom Teachers Can Help Students Learn and Teach Them How to Learn', *Theory into Practice, Vol. 41, No. 2, Becoming a Self-Regulated Learner (Spring, 2002)*, 41(2), pp. 71–80.
- Krathwohl, D. R. (2002) 'Theory Into Practice A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview', *THEORY INTO PRACTICE, Volume 41, Number 4, Autumn 2002*. doi: 10.1207/s15430421tip4104\_2.
- Makany, T., Kemp, J. and Dror, I. E. (2008) 'Optimising the use of note-taking as an external cognitive aid for increasing learning'. doi: 10.1111/j.1467-8535.2008.00906.x.
- Michael Orey (2010) *Emerging Perspectives on Learning, Teaching, and Technology*. The Global Text Project.
- Piolat, A., Olive, T. and Kellogg, R. T. (2005) 'Cognitive Effort during Note Taking', *Applied Cognitive Psychology Appl. Cognit. Psychol*, 19, pp. 291–312. doi: 10.1002/acp.1086.
- Stacy, E. M. and Cain, J. (2015) 'Note-taking and Handouts in The Digital Age', *American Journal of Pharmaceutical Education*, 79(7). doi: 10.5688/AJPE797107.
- Tsai, T.-F. (2009) 'EFL College Freshman Note-Taking Training for Reading Comprehension', *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 5(2).
- Di Vesta, F. J. and Gray, G. S. (1972) 'Listening and note taking', *Journal of Educational Psychology*, 63(1), pp. 8–14. doi: 10.1037/H0032243.
- Ward, N. and Tatsukawa, H. (2003) 'A Tool for Taking Class Notes', *International Journal of Human-Computer Studies*.



Sumber dokumentasi: glints.com



## Pengetahuan, Keterampilan Dan Kompetensi : Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Penjaminan Mutu



Selvies Lea Babutta, S.Si, M.Pd  
Widyaprada Muda - LPMP Prov. Sultra

**P**rofesionalisme akan selalu menjadi tuntutan dikancah persaingan ketat dunia kerja di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Semua pelaku baik kepala sekolah, guru maupun tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan akan mendapatkan tuntutan yang sama. Semua bentuk perencanaan program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan agar setiap orang yang bergelut didalamnya dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas melalui kerja profesional mereka. Dengan kata lain, mutu merupakan tuntutan karakteristik output sebagai sebuah hasil pada kerja apapun di era sekarang ini.

### Profesionalisme Guru Dalam Kebutuhan Global dan Nasional

Kata “profesionalisme” mungkin sudah menjadi frase yang sering diperdengarkan dan kini menjadi bahan baku dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Profesionalisme berasal dari kata ‘profesi’ yang dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Berdasarkan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dapat dikatakan bahwa melakoni sebuah profesi sangat memerlukan kompetensi yang mencakup kemampuan utuh baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang dimatangkan dalam proses pendidikan formal/khusus sesuai bidangnya.

Tanggal 2 Desember tahun 2004 adalah waktu pencanangan guru sebagai profesi yang pengembangan profesionalismenya dilakukan melalui: (1) sistem pendidikan, (2) sistem penjaminan mutu, (3) sistem manajemen, (4) sistem remunerasi dan (5) sistem pendukung

profesi guru. Pencanangan ini memberi indikasi bahwa guru yang profesional merupakan target utama dalam usaha pengembangan “profesionalisme” di setiap satuan pendidikan di republik ini. Saat ini peningkatan profesional guru tetap menjadi salah satu program prioritas Kemendikbud melalui program Guru Penggerak yang membawa misi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di segala lini dan bagi setiap peserta didik. Menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa program prioritas ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat bersekolah serta mendapatkan pemerataan dan akses pendidikan yang berkualitas (Kompas, 2021).

Kualitas perlu dibangun dan diusahakan. Kualitas tidak dapat diraih dengan hanya menunggu. Oleh karena itu, membangun suatu bentuk penjaminan kualitas harus dilakukan secara bersama-sama. Secara global, jaminan akan pemberian layanan pendidikan yang berkualitas dan keharusan penerapan standar manajemen mutu mulai bergaung saat konferensi dunia “*Education for all*” yang dipimpin oleh UNESCO di Jomtien, Thailand, pada tahun 1990. Hasil dari konferensi ini memberikan suatu bentuk adopsi kebijakan bagi komunitas negara-negara internasional untuk bersepakat tentang perlunya jaminan mutu dalam pendidikan. Konferensi ini juga memberikan amanah bahwa semua negara harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan semua aspek kualitas pendidikan serta memastikan pentingnya pencapaian substansial dari hasil pembelajaran yang diakui dan terukur di sekolah, terutama dalam keterampilan membaca, berhitung dan keterampilan hidup. Dokumen *United Nations Sustainable Development Goal 2015-2030*, menyatakan bahwa pada tahun 2030 seluruh pemerintahan negara-negara di dunia harus mampu menjamin bahwa siswa mendapatkan pengajaran dan pembelajaran dari guru-guru yang berkualitas, terlatih dan merupakan sosok motivator yang baik (Ayeni, 2011).



Tidaklah mengherankan jika upaya-upaya terus dilakukan untuk menggenjot pengembangan kompetensi baik melalui peningkatan kualifikasi, pengetahuan maupun keterampilan guru.

### **Pengembangan Kompetensi Secara Berkelanjutan**

Pengembangan profesionalisme guru menjadi suatu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap guru. Kebutuhan untuk dapat mengembangkan diri seharusnya menjadi suatu yang diperhatikan secara serius oleh masing-masing guru sebagai tenaga pendidik. Tidak hanya sekedar mengajar dan mengugurkan kewajiban semata, tetapi dapat meningkatkan seluruh potensi diri secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal tersebut sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas. Kompetensi guru di Indonesia dikemas secara utuh dalam empat aspek yang meliputi kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional. Keempat kompetensi inilah yang menjadi indikator kualitas profesionalisme guru. Namun, masih ada juga guru yang justru tidak mengetahui empat kompetensi yang melekat pada tugas dan tanggungjawab profesinya ini. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.

Guru merupakan agen utama pendidikan yang harus senantiasa tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi. Guru tidak saja sekedar memiliki pengetahuan tetapi juga harus memiliki keterampilan yang baik disertai dengan sikap positif dalam merespon perubahan. Apakah ini untuk kepentingan guru sendiri? Tentu saja tidak karena pada hakikatnya muara akhir dari peningkatan kualitas guru adalah pada peserta didiknya. Beberapa kajian terkait kualitas guru menunjukkan bahwa keterampilan profesional dan kompetensi guru merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil yang dicapai anak (*the scottish government, 2016*)

Mari belajar ketika awal pandemi akibat virus covid-19 menghantam hampir seluruh belahan dunia. Pandemi ini mengakibatkan munculnya berbagai kebijakan untuk mencegah penularan yang semakin tinggi di masyarakat, termasuk penerapan *physical distancing* dan pembatasan sosial. Kedua hal ini juga berimbas pada dunia pendidikan kita. Sistem pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka, mau tidak mau harus dilakukan secara jarak jauh. Disinilah profesionalisme guru teruji baik dari segi

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki terutama dalam hal mencari solusi-solusi kreatif dari kondisi yang terjadi. Dengan kondisi pembelajaran yang bergeser kearah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, guru dituntut untuk dapat mendesain pembelajaran yang inovatif sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung walau dengan segala keterbatasan.

Dapatkah kita membayangkan bagaimana seorang guru menghadapi kondisi ini jika hanya bekal pengetahuan saja tanpa keterampilan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi? Dapatkah peserta didik mendapatkan pembelajaran dan meningkatkan hasil pembelajaran mereka? Oleh karena itu guru harus selalu memperbaharui, memperluasa dan meningkatkan setiap potensi dan kompetensinya. Saat ini guru tidak hanya dituntut menguasai materi ajarnya tetapi juga harus memiliki keterampilan bagaimana mengajarkannya dalam kondisi-kondisi tertentu yang tak terduga seperti saat ini dimana pembelajaran jarak jauh menjadi satu-satunya alternatif bagi terselenggaranya pendidikan di setiap satuan pendidikan. Guru perlu memiliki keterampilan yang relevan yang dapat divisualisasikan melalui pemanfaatan teknologi, penggunaan media pembelajaran, melakukan penilaian hingga mengelola pembelajaran yang bermakna dalam segala kondisi.

Selain itu, hal yang sangat mendasar bagi guru adalah memiliki kepribadian yang baik, *melek* terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik, lingkungan, dan masyarakat. Harapan terbesar dari adanya pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan adalah adanya insan-insan pendidik yang memiliki keutuhan pribadi yang unggul bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga dapat menerapkannya dalam tanggungjawab yang diembannya. Guru haruslah menjadi pribadi yang secara terus menerus mengembangkan diri dan dapat memberikan contoh moral sebagai figur yang 'ditiru dan digugu' oleh peserta didik.

Coba tanyakan pendapat para peserta didik tentang guru yang baik dan berkualitas, maka kita akan menemukan jawaban mereka bahwa guru yang 'baik' bagi mereka adalah guru yang tidak hanya memiliki 'pengetahuan atau pintar dan menguasai mata pelajaran mereka' tetapi juga adalah guru yang mudah diajak berbicara, yang 'gaul', peduli, humoris, memberi semangat, ceria, suka mendengarkan, tegas, dan jawaban lainnya.



Semua jawaban yang terlontar kecenderungannya berasal dari hubungan yang menyenangkan dan konstruktif yang terbangun antara guru dan peserta didiknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengajar bukan hanya tentang penyampaian pengetahuan dan keterampilan tetapi juga tentang memiliki dimensi moral/etika yang tidak boleh hilang dan semuanya itu dikemas secara utuh dalam 'kompetensi'. Kompetensi merupakan indikator kinerja yang memadai untuk memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas. Tuntutan akan peningkatan kompetensi guru akan terus ada dan bergulir seiring dengan kemajuan jaman dan peradaban.

### Kerjasama dalam Penjaminan Mutu

Salah satu daya dukung untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan yaitu adanya pengembangan program yang dapat berkelanjutan (*sustainable*). Program yang berkelanjutan bukanlah program semusim saja yang akan berganti bahkan hilang seiring bergantinya manajemen atau pimpinan karena pada hakekatnya pergantian pimpinan tidak mengubah visi institusi. Upaya pengembangan kompetensi merupakan suplemen utama bagi 'profesionalisme' guru sehingga layanan pembelajaran yang diberikan mengarah pada mutu capaian yang dihasilkan oleh peserta didik.

Lalu, **Bagaimana hasil yang bermutu dapat dilihat?** Jawabannya adalah **lihatlah pada prosesnya**. Proses yang bermutu terkait dengan bagaimana seorang guru dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya melakukan perencanaan, melaksanakan dan melakukan evaluasi berdasarkan hasil supervisi di sepanjang proses maupun akhir pelaksanaan tugasnya. Fokus utamanya adalah pengendalian terhadap proses yang berjalan sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna dan pencapaian hasil peserta didik sesuai kompetensi yang dipersyaratkan.

Melihat semua proses ini, tentu saja guru tidak dapat bekerja sendiri, mereka membutuhkan orang lain yang berada di lingkungan belajar mereka. Setiap guru membutuhkan teman sejawat dalam sebuah komunitas pembelajaran sehingga dapat saling membangun dalam mencari dan berbagi praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan profesionalismenya demi kepentingan siswa. Selain itu, guru membutuhkan peran kepala sekolah maupun pengawas sebagai

supervisor maupun motivator. Dengan demikian, dapatlah dilihat dengan jelas bahwa untuk mendapatkan hasil yang bermutu perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain.

Berdasarkan sudut pandang konsep *Total Quality manajement* (TQM), untuk membangun budaya mutu, kepercayaan dan nilai setiap individu akan saling mendukung serta saling terkait dan melengkapi (seperti sebuah jaring) sehingga dapat menjadi tenaga penggerak. Setiap individu akan berkontribusi secara positif dalam institusi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu (Sallis E,2012).

Selain kompetensi dari individu-individu lain, guru juga memerlukan dukungan system yang kondusif yang terbangun baik dari dalam sekolah maupun pihak eksternal, seperti dukungan dari institusi pemerintah daerah, lembaga akreditasi, LPMP maupun perguruan tinggi.

Pada dasarnya, penjaminan mutu mencakup semua kebijakan, proses dan tindakan yang direncanakan, dipertahankan dan dikembangkan. Mutu pendidikan dapat digambarkan sebagai sejauh mana pendidikan memenuhi kebutuhan pelanggan/klien internal, melakukan evaluasi dan umpan-balik secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen. Setiap institusi yang terlibat dalam proses penjaminan mutu, harus siap melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan terhadap kinerja ataupun pencapaian yang belum sesuai harapan. Setiap institusi harus mampu memberikan layanan yang berkualitas dan menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya dan mampu memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik.



Dokumentasi praktik profesioanal dengan teman sejawat di sekolah Kabupaten Konawe Utara.



LPMP sebagai institusi penjaminan mutu pendidikan menjadi salah satu institusi yang berperan strategis dalam peningkatan profesionalisme guru. Sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan, LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat melakukan upaya-upaya untuk menjamin bahwa sekolah dapat memberikan layanan proses pendidikan dan lulusan yang bermutu. Program-program yang *'sustain'* dapat bertahan dan berkelanjutan menjadi bidikan yang harus mampu dikembangkan oleh lembaga. Penjaminan mutu tidak lepas dari adanya kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama sehingga dapat bekerja secara optimal, baik secara internal maupun eksternal lembaga. Sinergitas dengan pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat dan institusi lain yang terkait dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Peningkatan profesionalisme tetap harus berorientasi pada kerangka mutu karena mutu terkadang menjadi satu-satunya faktor pembeda bagi sebuah institusi.

### Referensi :

Ayeni, A.Joshua. (2011) *Teachers' Professional Development and Quality Assurance In Nigerian secondary Schools*

Kasih, A Pinenta (2021) *Mendikbud Nadiem: 8 Program Prioritas Merdeka Belajar di Tahun 2021*. Kompas 6 Januari

[Sallis, Edward \(2012\) \*Total Quality Management in Education manajemen Mutu Pendidikan\*. IrcisoD. Yogyakarta](#)

Scottish government, (2016) *Delivering Excellence and Equity in Scottish Education: A Delivery Plan for Scotland*. Publication-Strategy Plan. 28 Januari



Peningkatan kompetensi melalui diklat kepala sekolah dan guru mata pelajaran di Kota Kendari



# Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah

Riya La Ode Makruf Tonda, S.Pd., MPd  
Widyaprada Madya - LPMP Prov Sultra



Setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib dilakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dan terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk mencapai atau melampaui delapan standar nasional pendidikan. Kewajiban ini merupakan kebijakan pemerintah agar satuan pendidikan sebagai ujung tombak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, benar-benar eksis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan sistematis. Ukuran kualitas pendidikan dapat dilihat dari seberapa besar sumbangsi satuan pendidikan dalam menciptakan iklim yang memungkinkan terselenggaranya sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi delapan standar nasional pendidikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.

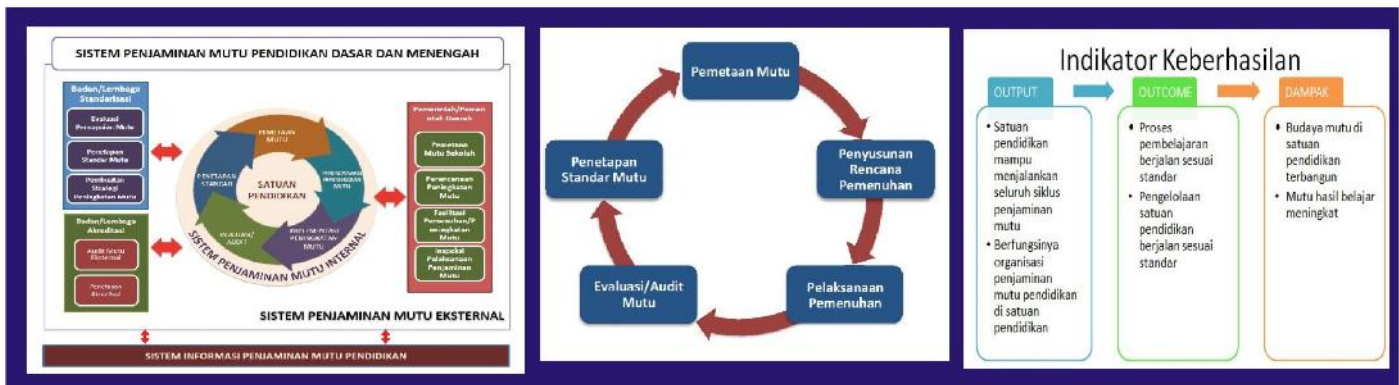
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pasal 3 Permendikbud No. 28 Tahun 2016 dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dikdasmen. Sistem penjaminan mutu internal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan di jalur formal jenjang pendidikan dasar dan menengah sedangkan penjaminan mutu eksternal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah, BSNP dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku seperti Pemda, Badan Akreditasi, LPMP, Perguruan Tinggi dan Dewan Pendidikan. Keduanya berjalan sesuai kewenangannya masing-masing sehingga saling mendukung dalam rangka tercipta sistem penjaminan mutu pendidikan yang kondusif dalam rangka terus meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana telah dicantumkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional.

Pada sistem penjaminan mutu internal maka sekolah diwajibkan untuk membentuk Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMPS) yang berwenang mengkoordinir pelaksanaan lima siklus penjaminan mutu di sekolah, pertama pemetaan mutu, kedua perencanaan peningkatan mutu, ketiga pelaksanaan peningkatan mutu, keempat monitoring dan evaluasi, serta yang kelima penetapan standar mutu baru. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membentuk tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) yang berwenang mengkoordinir, membimbing, mensupervisi sekolah dalam rangka memastikan apakah sekolah benar-benar menjalankan lima siklus sistem penjaminan mutu internal dengan baik atau tidak. TPMPD juga berkewajiban untuk membimbing sekolah dalam melaksanakan lima siklus SPMI tersebut.

Lebih dari 3000 (tiga ribu) sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara, namun sebagian kecil sekolah yang tersentuh program sekolah model SPMI yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara. Program ini dilaksanakan atas kerjasama dengan 17 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara mulai tahun 2016.





Pelaksanaan program ini diharapkan sekolah-sekolah tersebut mengimbaskan kepada masing-masing lima sekolah disekitarnya sehingga diharapkan semua sekolah di Sulawesi Tenggara dapat menjalankan sistem penjaminan mutu internal secara mandiri dan berkesinambungan. Target hasil sekolah model dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertama pada aspek *out put* adalah satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus SPMI dan berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan disatuan pendidikan, kedua pada aspek *out come* adalah proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar, dan pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar, sedangkan aspek yang ketiga yaitu pada aspek dampak bahwa budaya mutu disatuan pendidikan terbangun dan mutu hasil belajar meningkat.

Implementasi di lapangan mengindikasikan bahwa program tersebut hanya berjalan pada saat LPMP giat-giatnya mendampingi sekolah-sekolah untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dengan lima siklus tersebut diatas. Banyak masalah yang menjadi penyebab kondisi seperti tersebut diatas diantaranya, sekolah tidak mau mengikuti alur siklus SPMI karena cukup mengganggu pekerjaan guru-guru dan kepala sekolah yang masuk dalam tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Disamping itu, terkadang tidak sinkronnya antara petunjuk penggunaan dana BOS dengan hasil analisis rapor mutu sehingga tidak memungkinkan penyerapan dana BOS yang maksimal. Terhadap beberapa permasalahan ini perlu digarisbawahi bahwa jika kita mengikuti secara seksama tentang pelaksanaan siklus SPMI sebenarnya tidak memberatkan sekolah jika tim penjaminan mutu pendidikan sekolah kompak dan terdistribusi tugas dengan merata. Pekerjaan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) akan menjadi ringan jika masing-masing anggotanya secara bersama-sama mengerjakan analisis rapor mutu,

membuat rekomendasi, membuat rencana implemntasi, melaksanakan rencana pencapaian mutu, monitoring dan evaluasi, dan membuat rencana pencapaian mutu baru. Mengimplemntasikan SPMI di sekolah membutuhkan pendampingan yang intensif dari tim penjaminan mutu pendidikan daerah (TPMPD), karena bagaimanapun juga kehadiran TPMPD sangat mempengaruhi kinerja sekolah dalam penerapan SPMI sehingga sekolah lebih termotivasi dan sungguh-sungguh menerapkan secara terus-menerus meskipun tidak ada lagi bantuan dana dari pihak luar. Pihak sekolah dapat meminta kepada LPMP untuk menugaskan tenaga fungsional yang ada sebagai pendamping sekolah dalam ber-SPMI. Sekolah seharusnya menjadikan SPMI dengan lima siklusnya sebagai suatu kebutuhan sehingga rencana kerja sekolah benar-benar relevan dengan permasalahan dan kebutuhan sekolah berdasarkan rapor mutu sekolah tersebut. Masih banyak sekolah yang tidak mengetahui manfaat sesungguhnya dari rapor mutu, sehingga dalam pengisian instrumen pemetaan mutu yang dilaksanakan setiap tahun tidak diisi dengan sebenarnya sesuai kondisi sekolah. Semoga tidak ada lagi sekolah yang mengisi instrumen pemetaan mutu hanya dilakukan oleh operator yang tidak mungkin mengetahui secara menyeluruh kondisi sekolah sebenarnya.

**Referensi:**

A. Sani, Ridwan, dkk. 2018. *Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Tsmart.  
 Wibowo, Wahyu. 2018. *Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Tsmart.  
 Permendikbud No. 28 Tahun 2016, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.



# Flipped Classroom Luring-Daring Memanfaatkan Program Belajar Dari Rumah Di TVRI Dan Akun Pembelajaran



Surip Widodo, S.Si, M.M.  
PTP Ahli Muda - LPMP Prov. Sultra

Sejak tahun 2020 *World Health Organisation* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global karena penularannya yang masif dan cepat. Karena yang mempengaruhi semua aspek kehidupan khususnya bidang pendidikan (WHO, 2020). Siswa dapat berperan sebagai pembawa dan penyebar Covid-19 tanpa gejala. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 hampir semua negara meniadakan kegiatan di sekolah. Per tanggal 17 April 2020, diperkirakan 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat bersekolah karena munculnya pandemi Covid-19 (UNESCO, 2020b).

Pandemi menciptakan suatu tantangan tersendiri (Adit, 2020) bagi dunia pendidikan yang mengharuskan pengelola sekolah, siswa, orang tua, dan guru harus bermigrasi ke sistem pembelajaran digital atau *online*, yang dikenal dengan istilah *e-learning* (UNESCO, 2020a), yang di Indonesia dikenal dengan istilah pembelajaran dalam jaringan atau “pembelajaran daring” yang mengakibatkan perubahan sistem belajar mengajar menjadi belajar di/dari rumah (Arora and Srinivasan, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, Kemdikbud melalui SE Nomor 4 Tahun 2020 menerbitkan landasan pelaksanaan pembelajaran masa pandemik covid-19 berbentuk pembelajaran jarak jauh (Kemdikbud, 2020b). Strategi pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi solusi agar pembelajaran tetap berlangsung dimana siswa belajar di rumah secara daring, luring, dan kombinasi (daring dan luring). Aspek kurikulum PJJ yang diatur melalui SE Nomor 719 Tahun 2020, menyatakan bahwa kurikulum pembelajaran yang diterapkan selama masa pandemi bersifat hal-hal esensial dan tidak ada kewajiban menerapkan ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh (Kemdikbud, 2020a).

## Program Belajar Dari Rumah Di TVRI

Dalam pelaksanaan PJJ muncul kendala-kendala seperti masih banyaknya sekolah di daerah yang tidak memiliki akses internet, kesulitan menggunakan platform teknologi, hingga keterbatasan dana untuk kuota internet atau pulsa. Untuk memberi alternatif pembelajaran bagi siswa, guru, maupun orang tua, selama masa belajar dari rumah ditengah wabah Covid-19, mulai hari Senin tanggal 13 April 2020, Kemdikbud menayangkan program bertajuk Belajar Dari Rumah Di TVRI yang memuat berbagai tayangan edukasi, yang salah satunya merupakan tayangan pembelajaran untuk jenjang PAUD hingga pendidikan menengah (Kemdikbud, 2020b) dengan mengikuti modul pembelajaran yang mengutamakan pemenuhan kompetensi literasi, numerasi, dan penguatan karakter.



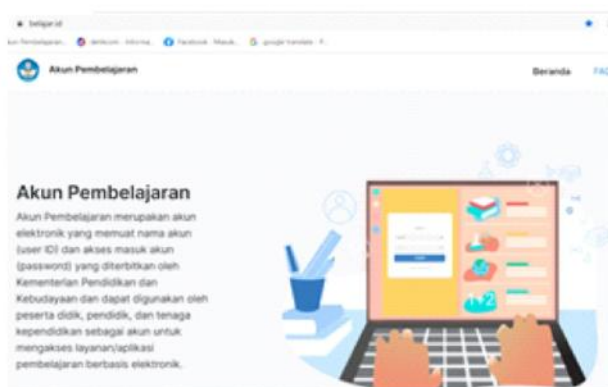
Suasana program belajar di rumah dengan TVRI  
(Sumber : AKCDN (2020))

Dengan peluncuran program tersebut, Kemdikbud ingin memastikan bahwa dalam masa yang sangat sulit ini tersedia berbagai macam cara untuk mendapatkan pembelajaran dari rumah, salah satunya melalui media TVRI yang merupakan saluran gratis yang bisa dinikmati masyarakat di berbagai daerah, dan bisa dimanfaatkan oleh siswa, guru, dan orang tua untuk membantu pembelajaran dari rumah selama pandemi Covid-19 (Kemdikbud, 2020b).



## Akun Pembelajaran

Selain pembelajaran melalui TVRI, melalui Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2020, Kemdikbud menyediakan kanal pembelajaran dalam jaringan (daring) yang dapat diakses melalui akun pembelajaran dengan domain belajar.id (Kemdikbud, 2020c) yang merupakan akun elektronik yang memuat nama akun (*user ID*) dan akses masuk akun (*password*) dalam bentuk akun Google. Akun Pembelajaran diterbitkan oleh Kemdikbud dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik untuk mendukung kegiatan belajar, baik Belajar Dari Rumah maupun pembelajaran tatap muka melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (Kemdikbud, 2020a).



Gambar Dashboard Akun Pembelajaran (Sumber: Kemdikbud (2020a))

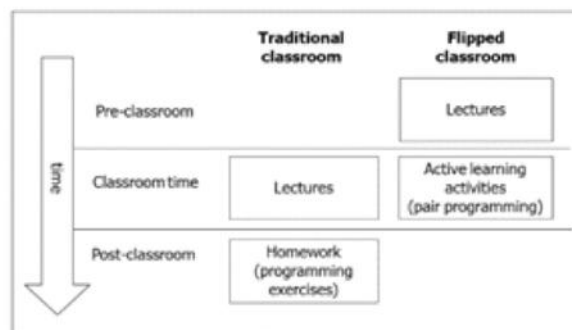
Setelah pendidik dan peserta didik melakukan aktivasi Akun Pembelajaran, akun tersebut dapat langsung digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang tersedia dalam *G-Suite for Education* (seperti *Google Classroom*, *Google Drive*, *Google Docs*, *Google Sheets*, *Gmail*, dan *Google Calendar*) serta aplikasi pembelajaran lainnya (Kemdikbud, 2020a).

## Flipped Classroom

*Flipped classroom* adalah sebuah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Jonathan Bergmann & Aaron Sams pada tahun 2008 yang didasarkan pada teori *Mastery Learning* oleh Bloom & Carrol yang diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan efektivitas perolehan hasil belajar. Dalam model *flipped classroom*, siswa belajar melalui video pembelajaran sebelum datang ke kelas dan melakukan kegiatan diskusi kelompok di dalam kelas (Bergmann, 2012), siswa belajar materi baru di rumah (Walsh, 2016), kegiatan di kelas lebih

difokuskan untuk kegiatan diskusi (Alamri, 2019) dan guru membantu menyelesaikan kesulitan dalam memahami konsep serta mengakomodasi setiap gagasan siswa (Tucker, 2011).

*Flipped classroom* membalik prosedur pembelajaran tradisional, yang dilakukan di kelas dalam pembelajaran tradisional menjadi dilaksanakan di rumah. Yang biasanya dilaksanakan di rumah sebagai PR dalam pembelajaran tradisional menjadi dilaksanakan di kelas dalam *flipped classroom*.



Gambar kelas tradisional dan *flipped classroom* (Sumber: Ngee MOK (2014))

Dalam *flipped classroom*, siswa mempelajari materi pelajaran di rumah dengan menonton video pembelajaran, membuat rangkuman, mencatat hal-hal penting, membuat pertanyaan, berdiskusi dengan teman secara *online*, atau membaca sumber-sumber yang dibutuhkan kemudian mengerjakan tugas-tugas untuk penguatan di kelas. Sedangkan pembelajaran di dalam kelas dilakukan melalui kegiatan diskusi, praktik laboratorium, dan penjelasan guru terhadap konsep-konsep yang belum dipahami siswa yang sifatnya memberi penguatan atau pendalaman.

## Flipped classroom luring-daring

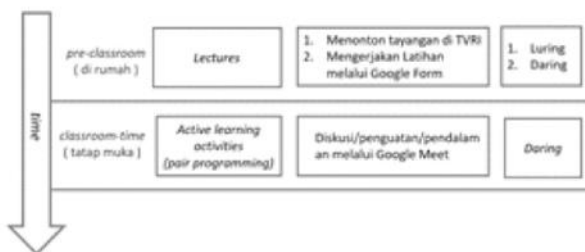
Solusi dari fakta bahwa guru mengalami kesulitan untuk memproduksi video sebagai bahan pendukung *flipped classroom* (Dewi, Padmadewi and Santosa, 2021) dapat ditempuh dengan memberi pelatihan khusus kepada guru-guru atau memanfaatkan video pembelajaran yang tersedia. Pemanfaatan video pembelajaran yang disediakan pemerintah melalui tayangan Program Belajar Dari Rumah Di TVRI dapat menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan ini, karena tayangan video pembelajaran di TVRI sesuai dengan kurikulum dan dapat diakses secara luring (tanpa jaringan internet) yang meringankan beban penggunaan pulsa internet siswa.



Siswa dapat mencatat materi video tayangan Program Belajar Dari Rumah Di TVRI yang diterimanya pada tahapan *pre-classroom* yang dilakukan di rumah sebagai bahan diskusi pada *classroom-time*. Sedangkan untuk memberi penguatan pembelajaran di kelas, guru dapat memberikan latihan soal yang dikirim menggunakan *Google Form* yang diakses melalui Akun Pembelajaran, untuk kemudian dikerjakan secara daring oleh siswa di rumah sehingga guru mengetahui partisipasi siswa dan bahan penilaian belajar siswa saat *pre-classroom*.

Pada tahap *classroom-time* dilakukan pembelajaran tatap muka secara daring dengan memanfaatkan aplikasi *video conference Google Meet* yang diakses melalui Akun Pembelajaran. Pembelajaran daring *classroom-time* dibuat terjadwal agar semua siswa mengikuti jadwal yang ditetapkan. Siswa-siswa yang tidak mempunyai gawai atau memiliki masalah dengan jaringan internet dapat bergabung dengan siswa lain yang memiliki gawai atau kondisi jaringan internetnya bagus untuk mengikuti pembelajaran tatap muka daring bersama guru dan siswa lainnya. Melalui aktifitas pembelajaran tatap muka dapat dinilai partisipasi dan penilaian belajar siswa saat *classroom-time*.

Implementasi *flipped classroom* secara luring dengan memanfaatkan Program Belajar Dari Rumah di TVRI dan secara daring melalui Akun Pembelajaran yang merujuk Ngee MOK (2014) digambarkan sebagai berikut :



Gambar *Flipped classroom* luring-daring

Sebelum *pre-classroom*, guru harus mengirimkan petunjuk pembelajaran yang berisi tata cara belajar meliputi jadwal tayangan TVRI, catatan yang harus dibuat siswa, dan cara mengerjakan soal latihan. Pada tahap *pre-classroom* dan *classroom-time*, guru harus memantau semua siswa. Aplikasi WhatsApp dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi tersebut kepada siswa, dan menjadi sarana penyambung komunikasi secara luring siswa-guru atau siswa-siswa khususnya pada saat *classroom-time*, termasuk mengingatkan siswa yang belum bergabung dalam pembelajaran daring.

**Referensi:**

Adit, A. (2020) *Ini Peran dan Tuntutan Kompetensi Guru di Masa Pandemi Halaman all - Kompas.com*. Available at: <https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/08/113530671/ini-peran-dan-tuntutan-kompetensi-guru-di-masa-pandemi?page=all> (Accessed: 28 June 2021).

AKCDN (2020) 'Ilustrasi Belajar Di TVRI'. AKCDN Detik.id. Available at: [https://akcdn.detik.net.id/visual/2020/04/14/9c5b9931-5473-4877-bde7-dabb5fd2692e\\_169.jpeg?w=650](https://akcdn.detik.net.id/visual/2020/04/14/9c5b9931-5473-4877-bde7-dabb5fd2692e_169.jpeg?w=650).

Alamri, M. M. (2019) 'Students academic achievement performance and satisfaction in a flipped classroom in Saudi Arabia', *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 11(1), pp. 103–119. doi: 10.1504/IJTEL.2019.096786.

Arora, A. K. and Srinivasan, R. (2020) 'Impact of pandemic covid-19 on the teaching – learning process: A study of higher education teachers', *Prabandhan: Indian Journal of Management*, 13(4), pp. 43–56. doi: 10.17010/pijom/2020/v13i4/151825.

Bergmann, J. (2012) *Flip Your Classroom*. Available at: [https://www.academia.edu/30809767/\\_Jonathan\\_Bergmann\\_Aaron\\_Sams\\_Flip\\_Your\\_Classroom\\_BookZZ\\_org\\_](https://www.academia.edu/30809767/_Jonathan_Bergmann_Aaron_Sams_Flip_Your_Classroom_BookZZ_org_) (Accessed: 29 June 2021).

Dewi, N. P. S. S., Padmadewi, N. N. and Santosa, M. H. (2021) 'The Implementation of Flipped Classroom Model in Teaching English to Junior High School Students', 5(1), pp. 125–135.

Kemdikbud (2020a) *Akun Pembelajaran Kemendikbud, Belajar.ID*. Available at: <https://belajar.id/> (Accessed: 29 June 2021).

Kemdikbud (2020b) *Kemdikbud Hadirkan Program Tayangan 'Belajar dari Rumah' di TVRI, Kemdikbud*. Available at: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemdikbud-hadirkan-program-tayangan-belajar-dari-rumah-di-tvri> (Accessed: 28 June 2021).



- Kemdikbud (2020c) *Kemendikbud Siapkan Alternatif Pembelajaran Melalui TVRI dan Kanal Daring Lainnya – bersama hadapi korona, BKSHM Kemdikbud*. Available at: <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/kemendikbud-siapkan-alternatif-pembelajaran-melalui-tvri-dan-kanal-daring-lainnya/> (Accessed: 29 June 2021).
- Ngec MOK, H. (2014) *Teaching tip: The flipped classroom, Journal of Information Systems Education*. Available at: [https://ink.library.smu.edu.sg/sis\\_research](https://ink.library.smu.edu.sg/sis_research) (Accessed: 8 July 2021).
- Tucker, B. (2011) *The Flipped Classroom - Education Next, Education Next*. Available at: <https://www.educationnext.org/the-flipped-classroom/> (Accessed: 29 June 2021).
- UNESCO (2020a) *Distance learning solutions*. Available at: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions> (Accessed: 19 June 2021).
- UNESCO (2020b) *Educational response to COVID-19*. Available at: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/support> (Accessed: 19 June 2021).
- Walsh, K. (2016) *A Study of the Flipped Classroom and Its Effectiveness in Flipping Thirty Percent of the Course Content, International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 5, May 2016*. Available at: <http://www.ijiet.org/vol6/712-T006.pdf> (Accessed: 29 June 2021).
- WHO (2020) *Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Controls in School*.



Dua anak menonton video belajar digital dari rumah di Bandung, Jawa Barat, Selasa 17 Maret 2020.  
Sumber dokumentasi: <https://metro.tempo.co/read/1324072/>



# DESAIN ALTERNATIF PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH BERGERAK TERPADU (DEAL PMP PEMDA BERRADU) SEBUAH AKSI TEROBOSAN PEMAJUAN PENDIDIKAN

Drs. La Ode Mane Mbeu, M.Pd  
Widyaprada Madya - LPMP Prov. Sultra

Penjaminan mutu pendidikan mestinya dipahami sebagai aksi yang tentu saja dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut yang kontinue yang bentuknya bisa beragam diantaranya adalah desain aksi.

Mutu dan budaya mutu di sekolah dipandang akan tumbuh berkembang, terpelihara secara lestari jika didorong dan dipacu oleh terobosan penentu kebijakan yang mendorong semua pemangku kepentingan berkolaborasi memajukan pendidikan persekolahan di wilayahnya.

Aksi pemajuan pendidikan di wilayah pemangku kepentingan tidak saja bertarget unggul kompetitif, tetapi ukuran-ukurannya setidaknya bersandar pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai indikator dan sub indikator mutu Pendidikan. Hal ini penting dilakukan sebab untuk sementara yang menjadi patokan maju tidaknya capaian mutu Pendidikan menggunakan ukuran delapan SNP.

Menyadari betapa pentingnya sumbangan pemikiran dan gagasan tentang terobosan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan di wilayahnya, maka Deal PMP Pemda Berradu menarik untuk dipublikasikan. Dengan demikian, maka desain-desain aksi penjaminan mutu pendidikan yang bersifat terobosan bagi pemerintah daerah menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Desain, alur dan tahapan implementasi hingga pendekatannya tentu saja perlu disosialisasikan secara luas untuk dipahami dan mendapat dukungan secara luas oleh para pihak yang berkepentingan.

## Apa, Mengapa dan Bagaimana Desain Aksi Terobosan PMP Pemda Berradu

Secara sederhana, desain aksi terobosan *Deal PMP Pemda Berradu* adalah sebuah rancangan praktis dan sederhana untuk dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang bersifat *bottom up*. Hal ini logis sebab pemda mendapatkan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Demikian pula pada ketentuan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (Lampiran I dan II) juga memberikan peluang besar kepada pemerintah daerah untuk berinovasi dan berkreasi dalam melakukan pengelolaan pendidikan serta penjaminan mutunya.

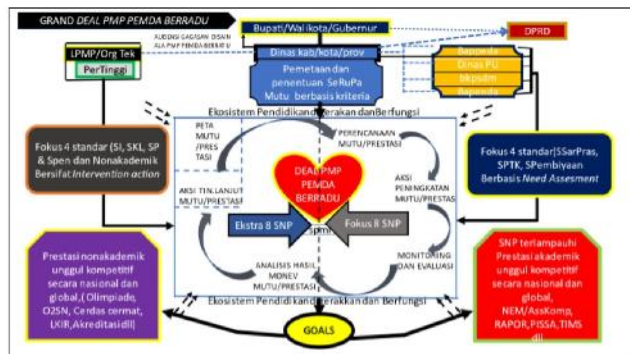
Ada beberapa alasan dan pertimbangan, baik secara logika faktual, teoretis maupun regulatif sehingga pemerintah daerah perlu *Deal PMP Pemda Berradu*, diantaranya adalah: 1) Untuk menjadi bagian dari inovasi Pemda dalam mengelola pendidikan dan melakukan penjaminan mutunya; 2) Sebagai gagasan dan aksi kreatif Pemda dalam mendukung pemerintah pusat untuk pemajuan pendidikan yang unggul dan kompetitif. Haywood (2007) dalam penelitiannya tentang kualitas perguruan tinggi yang berbasis pada pemenuhan tuntutan aturan dan kualitas perguruan tinggi yang berbasis pada mutu dan kinerja menemukan bahwa yang berbasis pada mutu dan kinerja meningkat kualitasnya secara signifikan sementara yang berbasis pada pemenuhan regulasi cenderung menurun. Ini berarti bahwa Desain seperti *Deal PMP Pemda Berradu* perlu ada sebagai acuan *stakeholders* untuk memajukan pendidikan yang unggul dan kompetitif sehingga tidak sekedar menunggu rancangan aksi dari pemerintah pusat.



John Hattie (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa guru memberikan kontribusi 30% bagi peningkatan hasil belajar. Itulah sebabnya maka guru pada satuan pendidikan perlu dipengaruhi, digerakkan dan dikembangkan mutunya oleh tim yang bergerak terpadu.

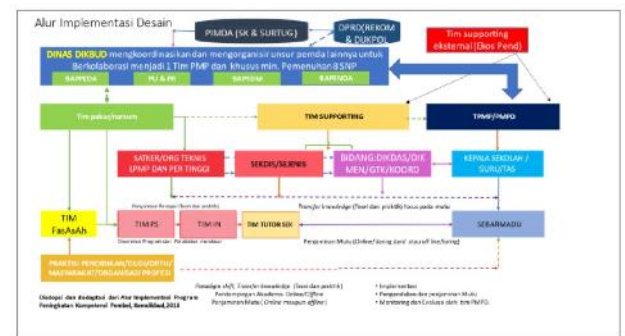
Penelitian yang dilakukan oleh De Roch (dalam Mane Mbeu; 2007) menemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan manajemennya memberikan kontribusi bagi kemajuan sekolah antara 30 – 36%. Inilah yang menjadi dasar mengapa kepala sekolah harus diseleksi dan berani menandatangani perjanjian dan pakta integritas. Pada sisi ini, tim Pemda perlu melakukan seleksi kepala sekolah sebagai sekolah uji coba *Deal PMP Pemda Berradu*

Merdeka Belajar menjadi isyarat tegas bahwa semua komponen terutama pemerintah harus mengubah paradigmanya antara lain seperti *Deal PMP Pemda Berradu*. Adapun desain dari *Deal PMP Pemda Berradu* adalah sebagai berikut.



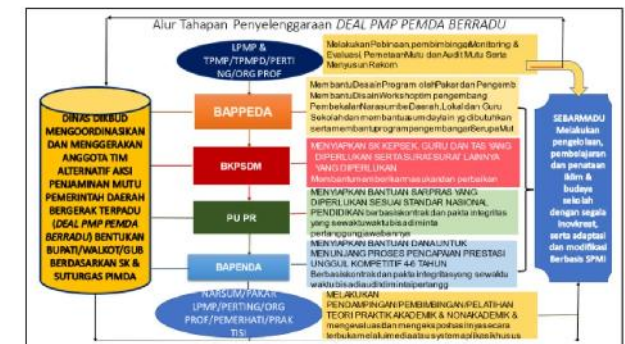
Gambar 1. Desain dari *Deal PMP Pemda Berradu*

Thomas Lickona (2007) menegaskan bahwa faktor dominan pembentukan karakter siswa adalah budaya sekolah. Itulah sebabnya mengapa guru dan staf sekolah harus diseleksi secara bertahap dan dipersiapkan karena karakter siswa tersebut adalah hasil kerja guru dan staf dalam mengimplementasikan kebijakan dari atas termasuk kebijakan kepala sekolah



Gambar 2. Alur Implementasi Desain

Praptono (2020) menyebutkan empat komponen utama sekolah penggerak yaitu: 1) Kepala sekolah yang fokus pada perbaikan kualitas pembelajaran dan peningkatan prestasi/hasil belajar siswa serta tidak sekedar mengurus administrasi dan aspek manajerial (kepemimpinan perubahan); 2) Guru inovatif dan kreatif yang berpihak pada siswa dan mengajar sesuai kadar kemampuan siswa yakni kemampuan modifikatif dan adaptif yang fokus pada hasil belajar (merdeka belajar); 3) Kemampuan belajar anak (multi literasi, metakognitif dan epistemic kognitifnya serta); 4) organisasi/komunitas pendukung utama peningkatan mutu dan perubahan (orang tua, tokoh, organisasi profesi serta ekosistem pendidikan). Tujuh elemen ekosistem pendidikan yang harus disinergikan dengan bagian yang telah tersedia di sekolah adalah: 1) Sekolah yang kondusif; 2) Guru sebagai penyemangat; 3) orang tua yang terlibat aktif; 4) masyarakat yang peduli Pendidikan; 5) Didu yang berperan penting; 6) organisasi profesi yang berkontribusi besar; dan 7) pemerintah yang berperan optimal.



Gambar 3. Alur Tahapan Penyelenggaraan DEAL PMP PEMDA BERRADU

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2020) tentang merdeka belajar yang menghapus UN dan UNBK menjadi asesmen kompetensi, mengubah RPP *role base* ke RPP

Ada beberapa istilah, akrononim dan singkatan yang digunakan dalam naskah ini. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. DEAL akronim dari Desain Alternatif.
2. PMP singkatan dari Penjaminan Mutu Pendidikan.
3. PERTING maksudnya adalah Perguruan Tinggi.
4. ORG PROF maksudnya adalah organisasi profesi.
5. PEMDA akronim dari Pemerintah Daerah.



6. BERRADU akronim dari Bergerak Terpadu.
7. Tim FasAsAh akronim dari Tim Fasilitator, Asesor dan Ahli.
8. Tim PS singkatan dari Tim Pengawas.
9. Tim IN singkatan dari Tim Instruktur Nasional.
10. SEBARMADU akronim dari Sekolah Bergerak Maju Terpadu.
11. TPMP singkatan dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi.
12. TPMPD singkatan dari Tim Penjaminan
13. Totor Sek, maksudnya Totor Sekolah.
14. PIMDA akronim dari Pimpinan Daerah
15. SK & SURTUG maksudnya Surat Keputusan dan Surat Tugas.
16. REKOM DUKPOL, maksudnya Rekomendasi dan Dukungan Politik.
17. Ekos Pend, Maksudnya ekosistem Pendidikan.

### Referensi:

Badan Akreditasi Nasional, 2020. *Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP)*

Depdikbud RI, 2018. *Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Bahan Tayang yang Dipublikasikan.*

Depdikbud RI, *Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.*

Fa'ad, Arif Noor, 2015. *Manajemen Guru Raudlatul Athfal Dalam TQM.*

<https://journal.iainkudus.ac.id>. Akses 12-9-2021

Mbeu, Mane, La Ode. *Pengembangan Model Kepemimpinan Efektif (Entel Cerdas)* Tesis yang telah dipublikasikan.

Praptono, 2020. *Empat Komponen Utama Sekolah Penggerak, Ditjen GTK.* [Http://gtk.kemdikbud.go.id](http://gtk.kemdikbud.go.id). empat. Akses 12-9-2021



Mencari Formula terbaik Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah  
sumber foto: kompasiana.com



Kegiatan Bimtek SPMI Sekolah Model oleh LPMP Sultra  
di SMPN 1 Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan





# ASESMEN NASIONAL

## TEROBOSAN BARU DALAM PENILAIAN MUTU SEKOLAH, MADRASAH DAN PROGRAM KESETARAAN

Gaudensius D. Beribe, S.Kom

Analisis Sistem Informasi dan Jaringan - LPMP Prov. Sultra

**K**ementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinahkodai oleh bapak Nadiem Makarim telah jauh-jauh hari sejak awal kepemimpinannya sudah membuat suatu konsep tentang evaluasi sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) yang disebut Asesmen Nasional (AN). Jika selama ini UN diperuntukan bagi seluruh siswa yang berada di tingkat akhir masa sekolah seperti kelas 6, 9, dan 12 sekarang tidak lagi. AN diperuntukan bagi kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA dan peserta didikpun diambil sampling saja, tidak semua seperti pada UN. Beliau tidak ingin lagi pendidikan Indonesia hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, yang mana UN dulu selalu menjadi momok mengerikan bagi peserta didik tetapi lebih ingin fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, juga layanan dan lingkungan pendidikan. Hal inilah yang membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengubah Ujian Nasional menjadi Asesmen Nasional.

### Apa itu Asesmen Nasional

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret *input*, proses, dan *output* pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.

Jika Ujian Nasional itu hanya mengevaluasi capaian siswa saja di setiap tingkat akhir pada jenjang sekolah, seperti kelas 6, 9, dan 12, Asesmen Nasional tidak lagi menitikberatkan pada evaluasi capaian siswa. Asesmen Nasional akan diterapkan untuk peserta didik yang berada di

kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA.

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Ada tiga komponen penting dalam pendidikan yakni kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Asesmen Nasional dilakukan bukan untuk menghakimi sekolah atau pemeringkatan sekolah. Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Disamping itu Asesmen Nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Asesmen Nasional menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah/madrasah dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

### Tujuan Asesmen Nasional

Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.

### Instrumen Asesmen Nasional

Asesmen Nasional memiliki tiga instrumen yaitu:

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)
2. Survei Karakter
3. Survei Lingkungan Belajar



Asesmen Kompetensi Minimum yang diukur adalah capaian peserta didik melalui pembelajarannya dibidang kognitif seperti literasi dan numerasi. Menurut *National Institute for Literacy*, yang dimaksud literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, bahkan menghitung dan memecahkan masalah. Menurut UNESCO, literasi memang menjadi hak setiap orang dan juga dasar yang harus dimiliki untuk belajar sepanjang hayatnya. Kemampuan literasi mampu memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, juga masyarakat.

Dapat dipahami, bahwa literasi yang dimaksud adalah kemampuan yang lebih dari sekedar membaca dan menulis, tetapi mendorong agar peserta didik mampu menganalisis dengan membaca situasi atau hal-hal yang terjadi di sekitarnya, dengan pemecahan masalah berdasarkan dari apa yang dipelajarinya.

Sedangkan numerasi, secara umum diartikan sebagai sebuah kecakapan dan pengetahuan seseorang dalam menggunakan berbagai macam angka serta simbol-simbol, yang terkait dengan matematika dasar. Nah, pengetahuan itu digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan numerasi, seseorang juga dapat menganalisis informasi yang ditampilkan dengan berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, bagan, dan banyak lainnya. Setelah mampu menganalisis, kemudian individu tersebut akan menggunakan interpretasi hasil analisisnya, untuk memprediksi dan selanjutnya mengambil keputusan.

Disamping itu, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, kemampuan literasi dan numerasi, adalah kemampuan yang akan berdampak pada semua mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Maka dari itu, memfokuskan pada kemampuan literasi dan numerasi, tidak bermaksud mengecilkan arti penting mata pelajaran lainnya. Menurutnya, justru dengan literasi dan numerasi, peserta didik akan sangat terbantu dalam memahami dan mempelajari bidang ilmu lainnya, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan angka secara kuantitatif.

Literasi dan numerasi adalah merupakan kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat.

Selanjutnya instrumen kedua yaitu survei karakter. Survei karakter dirancang untuk mengukur capaian peserta didik berdasarkan hasil belajar sosial emosional yang berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar pancasila. Survei karakter sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar. Meski demikian, survei karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar pancasila. Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, mencakup dimensi kognitif, afektif dan spiritual.

Selanjutnya instrumen ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini digunakan untuk mengevaluasi dan mencetak aspek-aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi, tidak hanya peserta didik saja nantinya yang akan dinilai, melainkan seluruh aspek yang mendukung pembelajaran. Dengan demikian dapat dengan mulai mengevaluasi apa yang seharusnya dapat ditingkatkan, dan sejauhmana capaian yang sudah dilakukan. Survei lingkungan belajar juga dapat dikatakan bahwa untuk mengukur: (a) kualitas pembelajaran, (b) iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, (c) refleksi guru, (d) perbaikan praktik pengajaran, (e) latar belakang keluarga peserta didik. Adapun informasi dari survei ini berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan.



Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Implementasi Peningkatan Literasi dan Numerasi ke Sekolah SMAN 1 Batauga Kab. Buton Selatan



## Perbedaan Soal Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada Asesmen Nasional (AN)

Aspek	Ujian Nasional (UN)	Asesmen Nasional (AN)
Format Soal	Pilihan ganda dan isian singkat	Pilihan ganda, kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian.
Komposisi	Pengetahuan 40%, aplikasi 40%, penalaran 20%	Pengetahuan 20%, aplikasi 50%, penalaran 30%
Konteks	50% soal UN tidak menggunakan konteks	Semua soal diberikan konteks (personal, sosial budaya, sains)
Teks untuk Stimulus Soal	Panjang 2-3 paragraf (100 kata), edikit ilustrasi. Hanya 1 teks untuk menjawab satu soal	Panjang bergradasi sesuai kelas. Di kelas 11 panjang teks sampai 700 kata. Teks disertai ilustrasi dan infografis, terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multitek.
Format Jawaban	Semua jawaban tunggal	Disediakan soal dengan jawaban terbuka

Sumber: Rakor Asesmen Nasional 2021

## Kepesertaan Peserta Didik, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik

Kepesertaan peserta didik dalam pelaksanaan Asesmen Nasional tidak seperti pada Ujian Nasional dimana pada Ujian Nasional pesertanya adalah semua peserta didik yang ada pada tingkat akhir pada setiap jenjang (kelas 6 SD/MI/SDLB, kelas 3 SMP/ MTs/ SMPLB, kelas 3 SMA/ SMK/MA/ SMALB/ MAK). Untuk peserta didik yang diikuti pada Asesmen Nasional adalah sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Peserta	Keterangan
SD/MI/SDLB sederajat	Kelas 5 (maksimal 30 siswa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa berbasis sampel yang ditentukan secara acak oleh Kemdikbud</li> <li>Tambahan 5 siswa cadangan</li> <li>AN diikuti oleh satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan tercatat di Kemdikbud, termasuk SPK dan SILN</li> <li>AN diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri</li> <li>Siswa SLB A, SLB C, SLB G tidak mengikuti AN</li> </ul>
SMP/MTs/SMPLB sederajat	Kelas 8 (maksimal 45 siswa)	
SMA/MA/SMALB sederajat	Kelas 11 (maksimal 45 siswa)	
SMK/MAK	Kelas 11 (maksimal 45 siswa)	

Program Kesetaraan	
Paket A/Ula	Kelas 5
Paket B/Wustha	Kelas 8
Paket C/Ulya	Kelas 11

Sumber: Rakor Asesmen Nasional 2021

Untuk Kepala Satuan Pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik/EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut menjadi peserta dalam Survei Lingkungan Belajar. Bagi pendidik yang mengajar di lebih dari satu satuan pendidikan wajib mengisi Survei Lingkungan Belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar dan bagi Kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan wajib mengisi Survei Lingkungan Belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin.

## Pelaksanaan

Moda pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2021 terdiri atas 2, yaitu:

- Berbasis komputer, daring atau semi daring
- Berbagi sarana prasarana/resource sharing dalam pelaksanaan AN

Untuk peserta utama jika tidak hadir maka dapat digantikan dengan peserta cadangan apabila berhalangan hadir dengan ketentuan sudah diketahui sehari sebelum pelaksanaan.

## Rencana Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021

Adapun rencana jadwal pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021 sebagai berikut:



Sumber: Rakor Asesmen Nasional 2021



Sesuai rencana jadwal pelaksanaan Asesmen Nasional di atas, dilaksanakan pada bulan September dan Oktober dimana pada bulan September untuk jenjang SMK /SMA /MA/ Paket C dan SMP/MTs. Hal ini dikarenakan umumnya jenjang pendidikan menengah sudah beberapa tahun terakhir ini telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan demikian sarana dan prasarana yang akan digunakan umumnya jenjang pendidikan menengah sudah memiliki dalam hal ini SMK/SMA maupun MA. Dan juga sebagian SMP/MTs juga sudah melaksanakan UNBK. Bagi jenjang pendidikan menengah Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) bukan merupakan hal yang baru karena pada prinsipnya aplikasi dan model pelaksanaannya ANBK tidak jauh berbeda dengan UNBK.

### Referensi:

\_\_\_\_\_. 2021. Materi Rakor Persiapan Asesmen Tahun 2021 - The Papandayan Hotel Bandung, 25-27 Februari 2021.

\_\_\_\_\_. 2020. Materi TOT Tim Teknis Provinsi, Hotel Novotel Tangerang Selatan, 18-20 Maret 2020.

\_\_\_\_\_. 2021. Materi Bimtek Verval TIK, Hotel Avenzel Cibubur Bekasi, 24-27 Maret 2021.

\_\_\_\_\_. 2021. Materi Pelatihan Tim Teknis AN Berbasis Komputer, Hotel Horizon Ultima Bekasi 3-5 Mei 2021.



Pelaksanaan Simulasi Ascsmen Nasional di SMPN 1 Batauga Kab. Buton Selatan



Pelaksanaan ANBK jenjang SMA di SMAN 1 Wawotobi Kab. Konawe





## PROSES PENDIDIKAN GURU PENGGERAK, MENGAPA SEMBILAN BULAN?

La Siara, S.Pd, M.Pd  
Widyaprada Madya - LPMP Prov. Sultra

Setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, Bapak Nadim Makarim telah menggagas kebijakan yang dinamai Merdeka Belajar untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa paket kebijakan Merdeka Belajar tahap pertama meliputi 4 (empat) hal, yaitu: 1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional diganti ujian (asesmen) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, 2. Ujian Nasional tahun 2021 diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang meniscayakan penyesuaian tata kelola penilaian pembelajaran di level satuan pendidikan maupun pada level nasional, 3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berimplikasi pada kebebasan guru untuk dapat memilih, membuat, dan menggunakan format RPP secara efisien dan efektif sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mengelola pembelajaran, dan 4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Keempat kebijakan tersebut tentu saja belum cukup untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Proses pendidikan dan pembelajaran yang belum berpusat pada peserta didik menjadi salah satu poin penting untuk dilakukan transformasi agar peserta didik menjadi nyaman dan bahagia dalam berinteraksi di kelas/sekolah. Selain itu, orientasi dari komunitas di satuan pendidikan yang masih lebih mengutamakan prestasi dibandingkan pencapaian kodrat setiap peserta didiknya perlu digeser paradigmanya. Hal krusial yang mendasar untuk segera dilakukan adalah mewujudkan tersedianya guru yang berdaya dan memberdayakan dengan orientasi pada proses pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Guru yang diharapkan tentunya mencirikan lima karakter yaitu berjiwa nasionalisme Indonesia, bernalar, pembelajar,

profesional, dan berorientasi pada peserta didik. Berbagai kebijakan dan program sedang diupayakan untuk hal tersebut dengan melibatkan berbagai pihak menjadi satu ekosistem pendidikan yang bergerak dan bersinergi dalam satu pola pikir yang sama antara masyarakat, satuan pendidikan, dan pemangku kebijakan. Program tersebut dinamakan Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang sejatinya mengembangkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar melalui pendidikan guru.

### Apa itu pendidikan guru penggerak?

Pendidikan guru penggerak (PGP) merupakan kegiatan pengembangan profesi guru melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik; serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri.

Pendidikan guru penggerak dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang pada tahun 2020 masih bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pendidikan guru penggerak meliputi pelatihan daring (sinkron dan asinkron), lokakarya, dan pendampingan secara individu yang berlangsung selama sembilan bulan.



Selama proses pendidikan guru penggerak, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Program pendidikan guru penggerak untuk pertama kali (angkatan I) diluncurkan pada tanggal 15 Oktober 2020 oleh Nadim Makarim, selaku Mendikbud saat itu.

Pada gilirannya nanti, setelah dinyatakan lulus pendidikan, Guru Penggerak diharapkan dapat menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara: 1) menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, 2) menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, 3) mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, 4) membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan 5) menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong *well-being* atau kesejahteraan psikologis bagi ekosistem pendidikan di sekolah.

### Apa Yang Dipelajari Dalam Program Pendidikan Guru Penggerak?

Yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ada 10 modul yang secara garis besar termuat dalam 3 paket modul. Paket Modul 1: Paradigma dan visi guru penggerak, yang dijabarkan menjadi modul 1.1. Filosofi Pendidikan Indonesia, 1.2. Nilai-nilai dan peran Guru Penggerak, 1.3. Membangun visi sekolah, dan 1.4. Membangun budaya positif di sekolah. Paket Modul 2: Praktik Pembelajaran yang berpihak pada murid, yang dijabarkan menjadi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi, 2.2. Pembelajaran Sosial Emosional, dan 2.3. Coaching. Paket Modul 3: Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah, yang dijabarkan menjadi modul 3.1. Pengambilan Keputusan Sebagai Pemimpin Pembelajaran, 3.2. Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, dan 3.3. Pengelolaan Program yang berdampak pada Murid.

### Siapa Peserta Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP)?

Peserta program pendidikan guru penggerak adalah guru-guru TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK baik berstatus PNS maupun Non-PNS dari sekolah Negeri maupun Swasta sesuai sasaran yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Sasaran Pendidikan guru penggerak tahun 2020 s.d. 2024 berjumlah

405.900 peserta dengan rincian dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tahun	Sasaran Program
2020	2.800
2021	13.100
2022	35.000
2023	95.000
2024	260.000

Peserta program pendidikan guru penggerak direkrut melalui proses pendaftaran melalui portal [guru penggerak https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru-penggerak/](https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru-penggerak/) dengan menggunakan akun SIMPKB guru. Setelah mendaftar, dilanjutkan dengan 2 (dua) tahap proses seleksi, yaitu seleksi tahap pertama terdiri dari seleksi administrasi, pengisian esai, dan tes bakat skolastik, sedangkan seleksi tahap kedua terdiri dari simulasi mengajar dan wawancara.

### Siapa Yang Memfasilitasi Proses Belajar PGP?

Yang memfasilitasi proses belajar dalam pendidikan guru penggerak adalah fasilitator, instruktur, dan pengajar praktik atau pendamping. Fasilitator melakukan fasilitasi pendidikan guru penggerak secara daring baik melalui tatap maya maupun dalam *learning management system (LMS)* yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Fasilitator melakukan fasilitasi secara penuh selama enam bulan. Pengajar praktik atau pendamping melakukan fasilitasi pendidikan guru penggerak selama sembilan bulan secara terjadwal (tidak secara penuh). Pengajar praktik melakukan fasilitasi secara luring dalam jadwal pendampingan individu sebanyak sembilan kali dan jadwal lokakarya sebanyak 10 kali. Instruktur melakukan tatap maya sebanyak minimal 10 kali atau selama 2 JP setiap modul dalam kegiatan elaborasi pemahaman. Instruktur, fasilitator, maupun pengajar praktik berasal dari unsur widyaiswara, widyaprada, dosen, pengawas, kepala sekolah, atau praktisi pendidikan yang telah melalui proses seleksi yang lebih ketat dan juga melalui pembekalan atau bimbingan teknis yang sudah dinyatakan lulus dan layak.

### Bagaimana Proses Pembelajaran PGP?

Proses pembelajaran pendidikan guru penggerak menggunakan metode: pelatihan daring (sinkron dan asinkron), lokakarya, konferensi, dan pendampingan.



Tahapan pembelajarannya mengikuti alur MERRDEKA yang merupakan singkatan dari Mulai dari diri, Eksplorasi konsep, Ruang kolaborasi, Refleksi terbimbing, Demonstrasi kontekstual, Elaborasi pemahaman, Koneksi antarmateri, dan Aksi nyata. Artinya dalam 10 modul yang dipelajari, setiap modul yang dipelajari oleh Calon Guru Penggerak (CGP) mengikuti alur tersebut.

**Mulai dari Diri:** CGP menjawab pertanyaan refleksi di *LMS* yang akan menghubungkan dengan topik yang akan dipelajari sebagai pengetahuan awal yang berbasis pengalaman CGP.

**Eksplorasi Konsep:** CGP mempelajari materi pembelajaran di *LMS* berdasarkan bahan bacaan, artikel, dan/atau menyimak video, termasuk menjawab pertanyaan dan memberi tanggapan atas jawaban rekannya.

**Ruang Kolaborasi:** CGP berdiskusi secara berkelompok secara daring yang difasilitasi oleh fasilitator.

**Refleksi Terbimbing:** CGP melakukan refleksi yang terbimbing di *LMS* dengan menjawab sejumlah pertanyaan refleksi terhadap hasil pembelajaran bersama fasilitator dan berdiskusi secara asinkron.

**Demonstrasi Kontekstual:** CGP mendemonstrasikan pemahaman terkait topik yang dipelajari disesuaikan dengan konteks sekolah/kelas masing-masing dengan penugasan di *LMS*, misal melalui studi kasus, membuat karya ilustrasi pemahaman diri, baik dalam bentuk narasi, video, komik, lagu atau puisi.

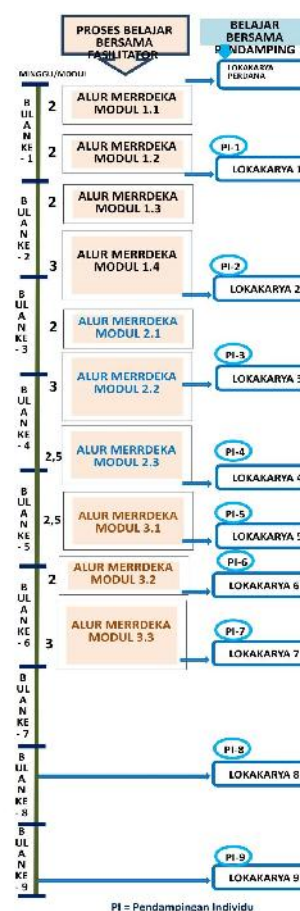
**Elaborasi Pemahaman:** CGP mengikuti konferensi atau webinar yang difasilitasi oleh instruktur/pengembang modul untuk menguatkan pemahaman. Termasuk misalnya ada paparan praktik baik dari sekolah yang menerapkan filosofi Kihajar Dewantara untuk modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara.

**Koneksi Antarmateri:** CGP membuat simpulan dan refleksi pengetahuan tentang pokok-pokok materi yang dipelajari dan keterkaitannya dengan materi lain, dengan penugasan di *LMS*, baik bentuk artikel, ilustrasi, screencast presentasi, atau infografis.

**Aksi Nyata:** CGP membuat rencana aksi berdasarkan penugasan sesuai topik yang dipelajari, kemudian menjalankan aksi nyata selama empat minggu, lalu hasil aksi nyata dilaporkan dalam bentuk artikel yang memuat latar belakang, deskripsi aksi nyata disertai langkah-

langkah kegiatan yang disertai foto, hasil kegiatan berdasarkan indikator yang ditetapkan, pembelajaran yang diperoleh (keberhasilan/kegagalan), dan perbaikan untuk diterapkan pada masa yang akan datang.

Paket modul 1 terdiri dari 4 modul yang dipelajari selama sembilan minggu, Paket modul 2 terdiri dari 3 modul yang dipelajari selama 7,5 minggu, dan paket modul 3 terdiri dari 3 modul yang dipelajari selama 7,5 minggu, total 24 minggu atau enam bulan dan menyisakan kegiatan lokakarya 8 dan lokakarya 9 yang pendampingannya selama tiga bulan. Secara detail dapat dideskripsikan melalui gambar.



Jumlah jam pembelajaran tatap muka dan belajar mandiri CGP secara keseluruhan setara 306 JP.

#### Referensi:

GTK. 2020. Kepdirjen GTK Nomor 3028/B/GT/2020 Tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak. Kemdikbud. Jakarta

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru/penggerak/>

<https://lms20-gp.simpkb.id/mod/hvp/view.php?id=44042>



# SUPERVISI AKADEMIK BERBASIS KONSUL, KONIN DAN KOTEKA SEBUAH LANGKAH PENJAMINAN MUTU DENGAN MODEL ARTISTIK YANG MENGINSPIRASI DAN MEMIKAT



Drs. La Ode Mane Mbeu, M.Pd  
Widyaprada Madya - LPMP Prov. Sultra

Indikator utama sebuah pendidikan persekolahan adalah proses pembelajaran. Saat proses pembelajaran terus berjalan dari waktu ke waktu tanpa terhenti, maka saat itu pula pendidikan persekolahan digambarkan oleh *stakeholders*-nya sebagai sesuatu hidup dan tumbuh berkembang. Tidak ada kualitas pendidikan persekolahan tanpa kualitas pembelajaran yang digerakan oleh guru dan kepala sekolah.

Salah satu kegiatan sebagai bagian dari dimensi kompetensi dan tugas seorang kepala sekolah yang bermuara pada bantuan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya adalah Supervisi Akademik. Disisi yang lain, supervisi akademik merupakan salah satu upaya penjaminan Mutu Pendidikan.

Di dalam Peraturan menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah ditegaskan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah adalah kompetensi supervisi. Demikian pula ketentuan pasal 9 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 pada butir e bahwa tugas kepala sekolah adalah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Karena itulah maka pemahaman, modal dasar dan implementasi supervisi mesti terus dilakukan kepada Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah terutama bila dikaitkan dengan Sekolah Penggerak.

Masalah yang menjadi kajian utama adalah

bagaimanakah basis dan pendekatan supervisi akademik yang menginspirasi dan memikat itu?

Pada dasarnya ada tiga modal utama mendasar bagi seorang supervisor yang menginspirasi dan memikat hati superviwee. Modal dasar itu adalah:

**1. Modal Dasar Konsul** yang maksudnya adalah modal dasar penguasaan konseptual. Salah satu aspek dari konseptual ini adalah hakikat supervise itu sendiri yakni bantuan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya (Daresh, Sergiovani 1989, Glickman, et al; 2007). Hal ini diperkuat oleh Kimball Wiles (1987): *“Supervision is assistance in the development of a better teaching learning situation”*.

Depdiknas (1994) menyatakan bahwa Supervisi akademik adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Senada dengan pandangan tersebut, Kimball Wiles (1987): *“Supervision is assistance in the development of a better teaching learning situation”*. Inti dari kedua pernyataan di atas adalah bahwa supervise adalah upaya pembinaan dan bantuan dari kepala sekolah atau pihak yang berwenang untuk itu kepada guru agar yang bersangkutan dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya dan pada akhirnya meningkatkan kualitas prestasi belajar anak didiknya.

Searah dengan penegasan di atas, ada juga yang menyatakan bahwa Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga mencapai tujuan pengajaran (Daresh, 2001).



Alfonso, Firth, dan Neville (1981) menegaskan “*Instructional supervision is here in defined as: behavior officially designed by the organization that directly affects teacher behavior in such a way to facilitate pupil learning and achieve the goals of organization*”. Menurut Alfonso, Firth, dan Neville, ada tiga konsep pokok (kunci) dalam pengertian supervisi akademik. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi pembelajaran bagi murid-muridnya.

**2. Modal Dasar Koin** yang maksudnya adalah menguasai Komunikasi Interpersonal alias piawai dalam membangun hubungan dirinya (*supervisor*) dengan pribadi yang lain (*supervisee.*) Supervisi akademik yang baik harus mampu membuat guru semakin kompeten, yaitu guru semakin menguasai kompetensi, baik kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Oleh karena itu, supervisi akademik harus menyentuh pada pengembangan seluruh kompetensi guru.

Menurut Neagley terdapat dua aspek yang harus menjadi perhatian supervisi akademik baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya, maupun penilaiannya. (Akhmad Sudrajad, 2015).

**Pertama**, apa yang disebut dengan **substantive aspects of professional development** (yang selanjutnya disebut dengan aspek substantif). Aspek ini menunjuk pada kompetensi guru yang harus dikuasai dan dikembangkan melalui supervisi akademik baik yang berkaitan dengan kepribadian, sosial, pedagogic maupun professional termasuk di dalamnya 8 kompetensi guru penggerak. Aspek substansi pertama dan kedua merepresentasikan nilai, keyakinan, dan teori yang dipegang oleh guru tentang hakikat pengetahuan, bagaimana murid-murid belajar, penciptaan hubungan guru dan murid, dan faktor lainnya. Aspek ketiga berkaitan dengan seberapa luas pengetahuan guru tentang materi atau bahan pelajaran pada bidang studi yang diajarkannya.

**Kedua**, apa yang disebut dengan **professional development competency areas** (selanjutnya disebut dengan aspek kompetensi). Aspek ini menunjuk pada luasnya setiap aspek substansi. Guru harus mengetahui bagaimana mengerjakan (**know how to do**) tugas-tugasnya. Ia harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana merumuskan tujuan akademik, karakteristik murid-muridnya, materi pembelajarannya, dan teknik akademik serta mampu menerapkan pengetahuan dan pemahamannya bagaimana membuat situasi dan strategi membelajarkannya (

*how to make and how to teach*)

**3. Modal Dasar Koteka**, yang dimaksudkan disini adalah kompetensi/penguasaan teknikal supervise itu sendiri. Idealnya seorang supervisor mesti mumpuni dalam penggunaan Teknik, model, pendekatan dalam melakukan supervise sebab setiap pribadi *supervisee* memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.



Secara teknikal, seorang Supervisor mesti menguasai penerapan Teknik individual, Teknik kelompok, penerapan model saintifik, model artistic dan model klinis. Supervisor juga harus piawai dalam menggunakan pendekatan direktif, kolaboratif dan nondirektif. Karena itu kepala sekolah dan pengawas sekolah harus menyadari posisinya dalam konteks pembekajaran di sekolah sehingga diharapkan dapat melakukan upaya peningkatan mutu Pendidikan lewat supervise akademik. Adapun posisi dimaksud adalah sbb:



**Referensi:**

Daresh, John C. 2001. *Supervision as proactive leadership. 3rd ed.* Prospect Heights, IL: Waveland Press.

Depdiknas RI, 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah.* Dikdasmen.

Depdikbud RI, 2018. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*, <https://simpuh.kemendikbud.go.id>. Akses 18 September 2021.



Glickman, C.D., Gordon, S.P., and Ross-Gordon, J.M. 2007. *Supervision and Instructional Leadership A Development Approach*. Seventh Edition. Boston: Perason.

<http://id.scribd.com/doc/123691363/Konsep-Dasar-Komunikasi-Interpersonal#scribd>, (akses 20 Januari 2015)

<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/03/04/konsep-supervisi-akademik>, (Akses 9 Juli 2015)

[http://eprints.walisongo.ac.id/344/4/Asyhari\\_Tesis\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/344/4/Asyhari_Tesis_Bab2.pdf), (Akses 9 Juli 2015).

Muqowim, 2011. *Pengembangan Soft Skill Guru*, Pustaka Insan Madani: Jakarta.

Mulyana, 2000; *Konsep Dasar Komunikasi*

*Interpersonal*, <http://id.scribd.com/doc/1236913#scribd>, akses 20 Januari 2015 pukul 15.30.)

Pusbangtendik, 2006. *Supervisi Akademik dalam peningkatan profesionalisme guru. Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Pendidikan Dasar*. Direktorat Tenaga Kependidikan; Direktorat jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Jakarta

\_\_\_\_\_. 2014. *Bahan Pembelajaran Utama Supervisi Akademik*, Jakarta

Sagala S, 2010. *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, Alfabeta: Bandung

Sergiovanni, T.J. 1982. *Supervision of Teaching*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.



Bimbingan Teknis Supervisi Satuan Pendidikan di Kab. Kolaka



Supervisi ke satuan pendidikan di Kab. Kolaka sebagai core program LPMP Prov.Sultra



## MENCEGAH KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK MENINGKAT DENGAN PENDIDIKAN ISLAM SECARA DINI



Zuharmi Hamaku, S.Si

Pendidik dan Pemerhati Masalah Sosial Anak

Beberapa waktu yang lalu, Dinas Pariwisata bersama Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menyegel tempat penginapan **RedDoorz Plus** di Tebet, Jakarta Selatan. Penyegelan dilakukan menyusul adanya temuan polisi terkait eksploitasi seksual anak di bawah umur di hotel tersebut. Diamankan 15 orang tersangka, 8 diantaranya wanita dan 4 orang anak di bawah umur. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan bahwa rata-rata yang diamankan berusia di bawah 17 tahun dan korbannya juga di bawah umur, “Empat orang kita kembalikan ke orang tuanya,” ungkapnya. Para pelaku nantinya akan dijerat dengan Pasal 76 juncto Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan /atau Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan /atau Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan /atau Pasal 296 KUHP dan /atau Pasal 506 KUHP. (detik.com, 2021).

Sebelumnya publik dikagetkan dengan kasus penggerebekan hotel milik artis **Cynthiara Alona** yang diduga dijadikan sebagai lokasi prostitusi *online*. Dari lokasi diamankan 15 anak di bawah umur yang berusia rata-rata 14 sampai 16 tahun, 3 orang tersangka yakni CA selaku pemilik hotel, DA selaku mucikari dan AA selaku pengelola hotel. Dari keterangan tersangka menyebutkan motif pelaku karena untuk menutupi biaya operasional hotel selama pandemi Covid-19. Ketiga tersangka tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara (cnnindonesia.com, 2021).

Dari dua kasus di atas cukuplah menggambarkan kepada kita semua bahwa kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur kian hari kian bertambah dan meresahkan. Anak sebagai penerus bangsa sejatinya dilindungi dan diarahkan bukan untuk dieksploitasi.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak dan Indonesia (KPAI) pada awal bulan Januari 2021, di Jakarta pihak kepolisian menemukan 47 orang anak yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi di Apartemen Green Pramuka. Di Mojokerto dan Sidoarjo Jawa Timur 36 orang anak menjadi korban prostitusi dengan pola *reseller online* di kos-kosan. Data ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tak menyurutkan maraknya kasus jual beli dan eksploitasi anak. Hasil tabulasi data pengawasan KPAI terdapat 149 kasus sampai dengan 31 Desember 2020. Berbagi modus dilakukan dalam rekrutmen jaringan prostitusi melalui proses *offline* maupun *online* di media sosial, modus lowongan kerja, modus jadi pacar, hingga mengajak teman (*peer recruitment*) untuk masuk dunia prostitusi (tempo.co, 2021). Ini adalah fakta yang mengagetkan sekaligus mengerikan.

Menyikapi hal tersebut, KPAI (2021) melalui Komisioner Ai Maryati dalam siaran persnya mengeluarkan beberapa rekomendasi di antaranya:

*Pertama*, mendorong koordinasi antar pemangku kepentingan perlindungan anak, Gugus Tugas TPPO, dan penegakan hukum dalam membangun situasi kondusif penanganan korban dan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



*Kedua*, memastikan anak mendapatkan pemenuhan layanan rehabilitasi psiko-sosial dengan memenuhi protokol kesehatan, terutama intervensi kesehatan reproduksi (kespro) fisik dan psikologis.

*Ketiga*, aparat penegak hukum segera mengungkap kasus-kasus tersebut dan menangani sampai akarnya dengan menggunakan aturan yang berlaku, yakni UU No 35/2014 Tentang perlindungan anak, UU No 21/2007 Tentang Pemberantasan TPPPO dan aturan perundangan lainnya.

*Keempat*, meningkatkan pengetahuan dan wawasan orang tua dan kalangan pelajar mengenai pemahaman kespro dan tindak pidana perdagangan orang.

*Kelima*, mendorong partisipasi anak dalam pembangunan sehingga anak memiliki kegiatan positif dalam pemanfaatan waktu luang dan terhindar pada situasi buruk prostitusi.

*Keenam*, perlu mengingatkan edukasi internet sehat dan pemanfaatan digital untuk kegiatan positif.

*Ketujuh*, berdasarkan masukan dari masyarakat, meminta pemerintah menutup platform media yang menyediakan aplikasi pertemanan yang potensial bahkan sangat massif digunakan untuk kegiatan prostitusi online (KPAI, 2021).

Rekomendasi ini diharapkan mampu mengurangi bahkan memutus mata rantai eksploitasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Walau faktanya angka kasus dari tahun ke tahun tak pernah berkurang bahkan cenderung meningkat tajam. Untuk itu perlu adanya upaya yang tepat memutus mata rantai kasus ini, tentunya haruslah melibatkan individu, masyarakat dan pemerintah sebagai pembuat aturan.

Sebagai agama yang sempurna, Islam sesungguhnya memberikan solusi terhadap permasalahan anak terkhusus eksploitasi seksual anak. Anak haruslah diarahkan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman islami secara dini agar dapat terhindar dari bahaya eksploitasi seksual. Selain itu perlu bersinergi dengan pemerintah sebagai pengayom, pelindung dan benteng bagi keselamatan rakyat seluruhnya termasuk anak. Mekanisme perlindungan negara haruslah bersifat sistematis, karena permasalahan eksploitasi seksual

anak melibatkan banyak aspek seperti aspek ekonomi, pendidikan, sosial, pengaturan media massa dan aspek hukum/sanksi. Setidaknya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu :

*Pertama*, sistem ekonomi. Di dalam islam dikenal dengan sistem ekonomi islam. Beberapa kasus kekerasan anak terjadi karena fungsi ibu sebagai pendidik dan penjaga anak kurang berjalan. Tekanan ekonomi memaksa ibu untuk bekerja meninggalkan anaknya. Untuk itu Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak agar para kepala keluarga dapat bekerja dan mampu menafkahi keluarganya. Sehingga, tidak ada anak yang terlantar, krisis ekonomi yang memicu kekerasan anak oleh orang tua yang stres bisa dihindari, dan para perempuan akan fokus pada fungsi keibuannya (mengasuh, menjaga, dan mendidik anak) karena tidak dibebani tanggung jawab nafkah.

*Kedua*, sistem pendidikan. Di dalam islam negara wajib menetapkan kurikulum berdasarkan akidah Islam yang akan melahirkan individu bertakwa. Salah satu hasil dari pendidikan ini adalah kesiapan orang tua untuk menjalankan salah satu amanahnya dalam merawat dan mendidik anak-anak, serta mengantarkan mereka ke gerbang kedewasaan.

*Ketiga*, sistem sosial. Di dalam Islam negara wajib menerapkan sistem sosial yang akan menjamin interaksi antara laki-laki dan perempuan berlangsung sesuai syariat. Di antaranya perempuan diperintahkan menutup aurat dan menjaga kesopanan, larangan berkhawat, larangan memperlihatkan dan menyebarkan perkataan serta perilaku yang mengandung erotisme dan kekerasan (pornografi dan pornoaksi) serta akan merangsang bergejolaknya naluri seksual.

*Keempat*, pengaturan media massa. Berita dan informasi yang disampaikan media hanyalah konten yang membina ketakwaan dan menumbuhkan ketaatan. Apa pun yang akan melemahkan keimanan dan mendorong terjadinya pelanggaran hukum syara akan dilarang keras.

*Kelima*, sistem sanksi. Di dalam Islam negara menjatuhkan hukuman tegas terhadap para pelaku kejahatan, termasuk bagi pelaku kekerasan dan penganiayaan anak. Hukuman tegas akan membuat jera orang yang terlanjur terjerumus pada kejahatan dan akan mencegah orang lain melakukan kemaksiatan tersebut.



Selain itu, orang tua juga mempunyai peranan penting dalam menyayangi anak-anak, mendidiknya, serta menjaganya dari ancaman kekerasan, kejahatan, serta terjerumus pada azab neraka (QS. at-Tahrim [66]:6). Salah satu materi pendidikan yang harus diberikan orang tua adalah terkait syariat Islam. Seperti batasan aurat, konsep mahram, *khalwat*, menundukkan pandangan, batasan berinteraksi dengan orang lain baik dalam memandang, berbicara, berpegangan maupun bersentuhan, pemisahan tempat tidur, dan hukum meminta izin dalam tiga waktu aurat.

Di saat yang sama masyarakat juga wajib melindungi anak-anak dari kekerasan. Masyarakat wajib melakukan *amar makruf nahi mungkar*. Tidak akan membiarkan kemaksiatan masif terjadi di sekitar mereka. Masyarakat pun berkewajiban mengontrol peran negara sebagai pelindung rakyat. Bila hal di atas dilakukan maka akan memutus mata rantai kasus eksploitasi seksual yang terjadi dan anak-anak pun akan tumbuh dan berkembang dalam keamanan dan kenyamanan serta jauh dari bahaya yang mengancam (**Wallahu a'lam**).

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

*Selamat & Sukses*

ATAS DILANTIKNYA

DRS. SAKKANGI, M.PD

SEBAGAI

Kepala  
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  
Provinsi Sulawesi Tenggara

[lpmpsultra.kemdikbud.go.id](http://lpmpsultra.kemdikbud.go.id) | [LPMP Sulawesi Tenggara](#) | [lpmp\\_sulawesitenggara](#) | [LPMP Sulawesi Tenggara](#)



# Dokumentasi Kegiatan



Pelantikan dan Pengukuhan Sumpah Jabatan Kepala LPMP Prov. Sultra dan BPPAUD-Dikmas Prov. Sultra secara virtual



Layanan ULT Keliling di Kabupaten



Pelaksanaan Sosialisasi/Pendampingan Teknis dan Monitoring Verval TIK di SMPN 2 Asera Kab. Konawe Utara



Bimtek Verifikasi Data Mutu Pendidikan dan Simulasi Asesmen Nasional 2021 di LPMP Prov. Sultra



Penyerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun pada Upacara Hari Kemerdekaan RI ke 76.



Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Implementasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi di SDN 1 Laompo Kab. Buton Selatan



Kegiatan Penyusunan Bahan Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan melalui daring



Kegiatan FGD Pemetaan dan Analisis Kebutuhan Penguatan Sarana per Wlayah dan Potensi Lokal di Kab. Konawe



Kegiatan Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi Berdasarkan SNP di Kab. Buton Selatan



# Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Mitigasi Resiko, PHBS, Literasi dan Numerasi Th.2021 di LPMP Prov. Sultra



Kegiatan Choaching Klinik Pendaftaran Program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua di Kab. Kolaka Timur



Kegiatan Pendampingan Fasilitas Berdasarkan SNP tAHAP ii di Kab. Konawe



Monitoring Pelaksanaan ANBK Jenjang SMK Kab. Kolaka Timur



Kegiatan Advokasi Implementasi Program Penguatan Sarana PJJ di LPMP Prov. Sultra



Webinar Sosialisasi PSP Angkatan 2 bersama LPMP Prov. Sultra dan BP-PAUD Dikmas Sultra



Seleksi Kompetensi Tahap I PPPK Guru Libatkan LPMP Prov. Sultra sebagai Pengawas Utama



Bimbingan Teknis Supervisi Satuan Pendidikan oleh LPMP Prov. Sultra di Kota Kendari



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ANBK di SMPN 1 Lasalepa Kab. Muna



# Serba-Serbi Pantun

Karya Drs. La Ode Mane Mbeu, M.Pd  
Widyaprada Madya - LPMP Prov. Sultra

**Minta Izin Memulai**



Pulau Binongko indah berbatu  
Dipersohor si burangasi  
Bukan memaksa meminta restu  
Mari bersama menginspirasi

Kuadon roti berkali-kali  
Kue pesta untuk mempelai  
Para tamu jangan membeli  
Izinkan aku untuk memulai


**PTMT**



Gagaslah PTMT dengan cemerlang  
Mari mulai jangan mengarang  
Abai covid stoplah sekarang  
Demi bangsa dimasa datang

Tiada guna tidak bersatu  
Dalam melawan klaster baru  
Inilah momen kita berpadu  
Demi mencegah corona baru

Peserta konsen fokus disari  
Saat berkonsen sepenuh kasih  
Sudah saatnya kuundur diri  
Aku ucapkan terima kasih

**Pelayan dan Pembaharu**

Singkirkan sudah yang tiada guna  
Selama bisa bah burung terbang  
Janganlah pasrah memberi makna  
Demi mutu unggul cemerlang

Ini era, era yang baru  
Momentum jitu berupa daya  
LPMP mestilah pembaru  
Untuk Negeri Indonesia Raya

Layang-layang terbangnya tinggi  
Jika diulur tiada menentu  
Sayang disayang ngomongnya tinggi  
Bila hasilnya tiada bermutu





# GIAT ANAK PAUD TPA TERATAI LPMP PROV. SULTRA



Serli, S.Pd  
Guru PAUD TPA Teratai



**A**nak merupakan generasi penerus bangsa yang harus memiliki wadah tempat pendidikan yang layak untuk menjadikan generasi kuat di masa akan datang. Untuk menjadikan anak itu kuat harus ada pendidikan yang layak karena itu merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa: Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003) artinya pemerintah dalam hal ini melakukan usaha secara sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara (Edi Sulis Purwanto. 2009: 1).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan prasekolah yang sangat penting bagi anak sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Di PAUD anak dididik dan dibina agar memiliki kesiapan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih

tinggi lagi yakni sekolah dasar. Selain pembelajaran yang diberikan kepada anak, dalam PAUD, anak juga belajar bersosialisasi dengan teman seumurannya melalui permainan. Pendidikan anak usia dini merupakan usaha dalam membantu anak mengembangkan semua aspek yang sesuai dengan usianya. Termasuk mengembangkan bakat dan potensi terpendam yang dimiliki anak.

Tujuan dari pendidikan anak usia dini antara lain membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Selain itu, pendidikan anak usia dini juga bertujuan membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di Sekolah Dasar (Hasan, 2010: 16). Pendidikan anak usia dini adalah sebagai tempat bagi anak-anak mengembangkan bakat dan kreativitas mereka, karena masa anak-anak merupakan masa di mana individu pertama memperoleh pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Dalam menerima pengetahuan yang diperolehnya, anak-anak hanya sekedar mengadopsi tanpa melakukan sebuah evaluasi baik atau buruk pengetahuan yang di perolehnya. Semua pengetahuan akan diserap secara menyeluruh oleh anak-anak, tanpa adanya sikap penyaringan terhadap sesuatu yang baik atau yang buruk. Maka, lingkungan yang baik akan dapat membentuk karakter anak yang baik, sebaliknya lingkungan yang buruk juga anak membentuk karakter anak yang buruk pula, oleh karenanya dalam masa ini lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun karakter anak.

Saat sekarang ini, PAUD mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan terus bertambahnya jumlah lembaga PAUD, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD sejenis lainnya dengan nama yang bervariasi banyak bermunculan.



Hal ini juga sebagai bukti meningkatnya kesadaran orang tua dan guru tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.

Banyak orang tua maupun guru telah memahami pentingnya masa emas (*golden age*) perkembangan pada usia anak. Sebagai masa penting, masa sensitifnya semua potensi yang dimiliki untuk berkembang. Untuk itu, perlu dukungan dari lingkungan yang kondusif bagi perkembangan potensi yang dimiliki oleh anak. Oleh karenanya orang tua dituntut untuk lebih teliti dalam memilih Lembaga Pendidikan nonformal dalam hal ini Taman Penitipan Anak (TPA) yang tepat untuk anak, agar potensi yang dimiliki oleh anak dapat berkembang secara optimal.

Salah satu pelayanan pendidikan anak usia dini adalah Taman Penitipan Anak. Sebagaimana tertulis dalam pasal 28 dijelaskan bahwa Taman Penitipan merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal. Adapula redaksi pasal 18 Undang-undang Sisdiknas adalah sebagai berikut :“pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat”.

PAUD TPA Teratai merupakan salah satu Pendidikan Anak Usia Dini yang menanamkan nilai moral dan agama bagi anak, sehingga diminati oleh orang tua untuk menitipkan anaknya, hal ini terbukti setiap tahun dalam penerimaan siswa baru jumlah pendaftar meningkat atau seimbang dengan anak yang keluar dan yang masuk. Dimana PAUD TPA Teratai beralamat di lingkungan kantor LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. PAUD TPA Teratai salah satu tempat penitipan anak yang notabeneanya bukan hanya yang tinggal di daerah kompleks LPMP, dan pegawai LPMP saja tetapi ada masyarakat luar kompleks LPMP Sultra

**Visi PAUD TPA Teratai yaitu terwujudnya anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan bertaqwa.**

Adapun misinya, diantaranya:

- a. Memberikan pengasuhan, layanan pendidikan bagi anak usia dini

- b. Membentuk karakter dan kepribadian serta mandiri
- c. Memahami diri sendiri, orang dan lingkungannya
- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan PAUD TPA Teratai.

Sedangkan tujuan program PAUD TPA Teratai LPMP Provinsi Sultra, yaitu:

- a. Membentuk anak-anak yang cerdas, berkualitas dan berkembang sesuai dengan tahap usianya.
- b. Menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak.

Untuk kurikulum PAUD TPA Teratai di susun sesuai dengan nilai-nilai islami sebagai dasar untuk pengembangan karakteristik anak dengan berbagai kebutuhannya. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan antara lain kepemimpinan, jujur, kreatif, tanggung jawab, sabar, percaya diri, kedisiplinan, estetis sosial, ingin tahu, bersyukur kepada Tuhan, dan peduli.

Dalam pengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan partisipatif. PAUD TPA Teratai menerapkan model pembelajaran kelompok, dimana kelompok anak dalam 1 (satu) hari bermain secara bergantian dalam melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran sesuai dengan indikator perkembangan Kurikulum 2013. Penerapan nilai-nilai dilakukan melalui pembiasaan rutin yang diterapkan selama anak berada di PAUD TPA Teratai LPMP Sultra dari kelompok ulat (1-2 tahun), kelompok kepompong dengan usia 2-3 tahun, kelompok kupu-kupu dengan usia 3-4 tahun, dan TK (A/B) dengan usia 4-6 tahun

PAUD TPA Teratai juga mengembangkan program khusus sebagai program unggulan dari satuan PAUD ini berupa :

- a. Pengenalan lingkungan sekitar
- b. Pengenalan seni daerah
- c. Pengembangan minat dan bakat anak
- d. Kegiatan parenting
- e. Kegiatan pentas seni

Untuk waktu pembelajaran mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 08.00 – 16.00 WITA.



Referensi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*. Jakarta : Depdiknas.

Hasan, Maimunah. 2010. *PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*. Yogyakarta: DIVA Press.

Purwanto, Edi Sulis. 2009. “Upaya Guru dalam Melatih Kemandirian Anak Usia Dini di TK Islam Ar-Rahman Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

### Kegiatan PAUD TPA Teratai LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara







LPMP SULTRA

LPMP

Sultra